

Penerapan Regulatory Impact Assesment dalam Proses Kebijakan Publik

Sasmito Jati Utama

Pengantar

Perumusan regulasi dan kebijakan publik seringkali dianggap sebagai sekedar pelaksanaan wewenang (*power*) pemerintah untuk mengatur. Regulasi seringkali dikeluarkan bukan karena kebutuhan. Banyak pemerintah daerah mengeluarkan regulasi atas suatu bidang/urusan hanya karena 'bidang tersebut merupakan wewenang pemerintah daerah' atau karena 'bidang tersebut belum diatur. Regulasi yang diterbitkan dengan cara yang tidak baik tersebut di atas menimbulkan dampak negatif yang besar bagi masyarakat dan dunia usaha. Survei Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menunjukkan bahwa hampir 40% peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota bersifat menghambat kegiatan ekonomi. Selama ini, dampak negatif ini pada umumnya tidak menjadi perhatian perumus regulasi. Dengan demikian, pelaksanaan wewenang menerbitkan regulasi yang semestinya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, justru dapat menimbulkan beban yang menghambat tercapainya kesejahteraan tersebut.

Sehubungan dengan eksistensi dari regulasi itu sendiri, maka regulasi pada garis besarnya dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu regulasi ekonomi yang mengatur kerangka acuan bagi pelaku ekonomi, regulasi sosial yang mengatur standar kesehatan, keselamatan, lingkungan dan sebagainya, serta regulasi administrasi yang mengatur formalitas dan prosedur. Bukti empiris menunjukkan bahwa regulasi yang baik dapat menciptakan iklim yang baik bagi pengembangan usaha. Hal ini sejalan dengan studi dari World Bank's bahwa diungkapkan dalam sektor swasta terdapat korelasi antara peraturan yang lebih baik dengan peningkatan iklim investasi, pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Dimana dalam kebijakan diharapkan adanya kelancaran hukum seperti pendaftaran, perizinan, pajak, dan retribusi; peraturan yang efektif biaya dan sederhana; kepastian dalam mekanisme partisipasi publik dan pemerintahan yang baik; serta kekonsekuenan dalam prinsip-prinsip hukum seperti penegakan hukum, proporsionalitas, dan efektifitas peraturan.

Terkait dengan hal tersebut analisis dampak peraturan merupakan perangkat yang penting yang menghubungkan kualitas tinggi peraturan, tata pemerintahan yang baik, dan pembangunan ekonomi. Selain itu partisipasi publik (*stakeholder*) dinilai dapat meningkatkan transparansi, membangun kepercayaan dan mengurangi risiko regulasi.

Sehingga hal ini dapat dikatakan sebagai solusi biaya terendah dalam membantu mengurangi biaya implementasi peraturan bagi regulator.

Selama ini dalam penyusunan produk hukum lebih bersifat *legal drafting* yaitu ditekankan kepada kesesuaian dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi namun tidak memandang peran serta pemangku kebijakan serta partisipasi umum. Dalam hal ini, diperlukannya suatu instrumen khusus untuk penyusunan kebijakan, terutama dalam penelitian kebijakan. Dalam tulisan ini, akan tentang tentang penerapan Regulation Impact Assesment atau Regulation Impact Analysis (RIA) dalam proses kebijakan publik.

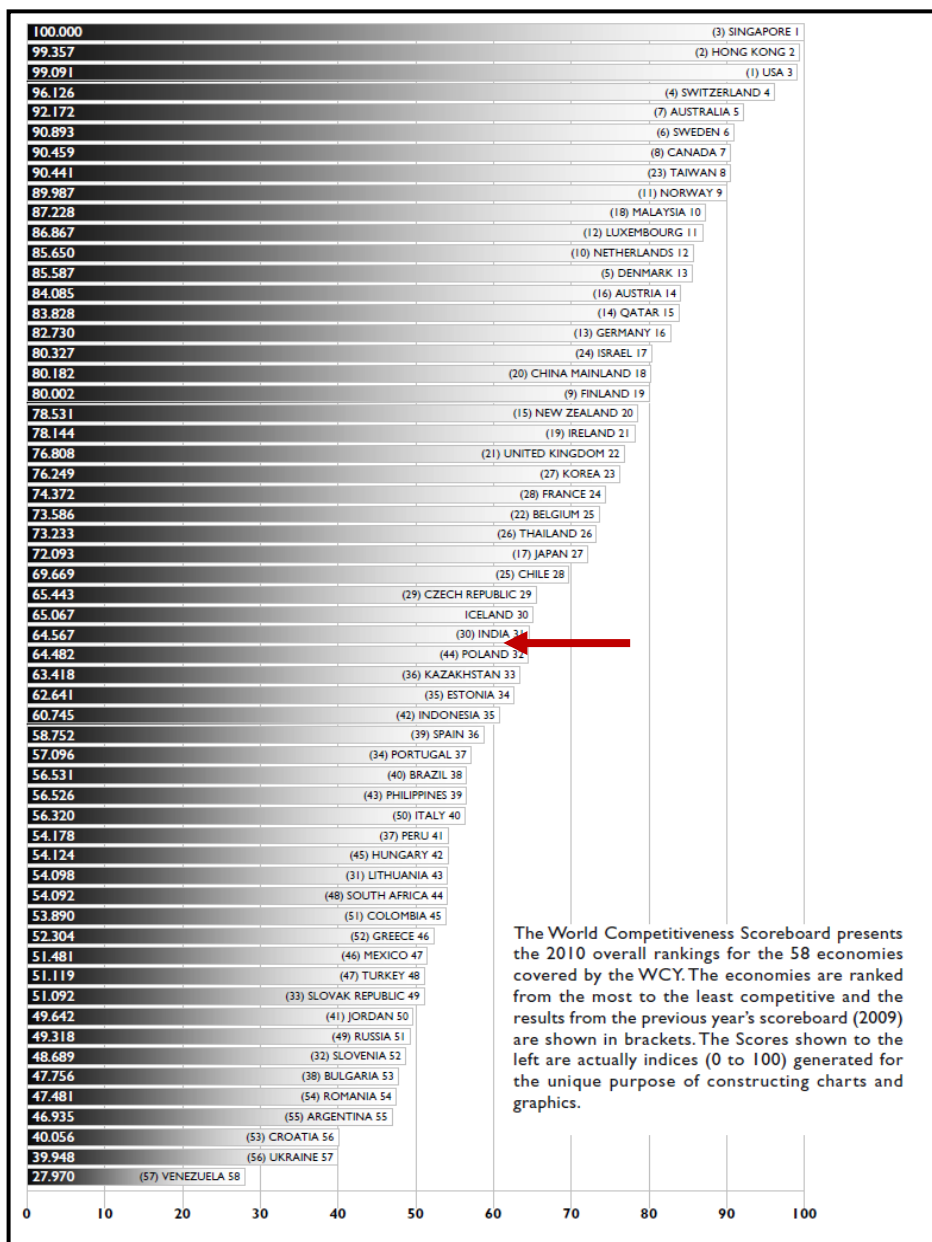
Potret Problema Regulasi Dan Dampaknya

Sebagaimana diketahui unsur utama dalam komunitas daerah – yakni pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha pada hakikatnya memiliki tujuan akhir yang sama, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masing-masing unsur mungkin memiliki tujuan atau harapan (ekspektasi) tersendiri. Pemerintah memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan PAD. Masyarakat menginginkan harga-harga barang yang murah, berkualitas dan mudah didapat, serta tersedianya lapangan kerja. Dunia usaha menginginkan iklim usaha yang kondusif dan kemudahan dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Namun demikian, semua unsur tersebut sepakat bahwa pada akhirnya, kegiatan mereka harus dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, pembuatan regulasi oleh pemerintah tidak boleh hanya dilihat sebagai pelaksanaan wewenang pemerintah, akan tetapi fungsi pembuatan regulasi hendaknya menjadi instrumen penting yang mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dalam upaya menerbitkan regulasi, harus menyeimbangkan antara perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan beban yang harus ditanggung oleh mereka yang terkena regulasi. Pada satu sisi, regulasi harus melindungi kepentingan masyarakat, seperti kelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat, keamanan dan ketertiban, serta kecukupan dana (PAD) untuk melakukan pelayanan publik. Pada sisi lain, regulasi tidak boleh membebani masyarakat terlalu berlebihan sehingga menghalangi masyarakat dan dunia usaha dalam membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran.

Problema tersebut menjadi tantangan utama pemerintah adalah bagaimana membuat regulasi yang ada maupun yang akan dibuat adalah mendukung terciptanya iklim yang kondusif bagi masyarakat, dunia usaha, maupun pemerintah dalam melakukan kegiatannya. Tantangan dalam perumusan regulasi adalah bagaimana agar regulasi yang dibuat membuat daerah tetap mempunyai daya saing yang tinggi dibanding daerah lain. Dalam konteks nasional, bagaimana regulasi tetap membuat Indonesia mempunyai daya saing di tingkat internasional.

Hasil survey *World Competitiveness Yearbook* menunjukkan bahwa posisi daya saing Indonesia terus merosot dari peringkat ke-47 pada tahun 2002, turun ke peringkat ke-57 pada tahun 2003, dan berada di peringkat ke-60 dari 61 negara pada tahun 2006. Lebih lanjut pada tahun 2010 Indonesia berada di peringkat 35 dari peringkat 42 pada tahun 2009¹. Namun demikian, hal yang perlu digaris bawahi adalah sejauh ini sebenarnya Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk lebih meningkatkan daya saingnya, namun nampaknya upaya tersebut masih belum cukup karena harus bersaing dengan negara lain yang sama-sama berpacu untuk meningkatkan daya saing negaranya masing-masing.



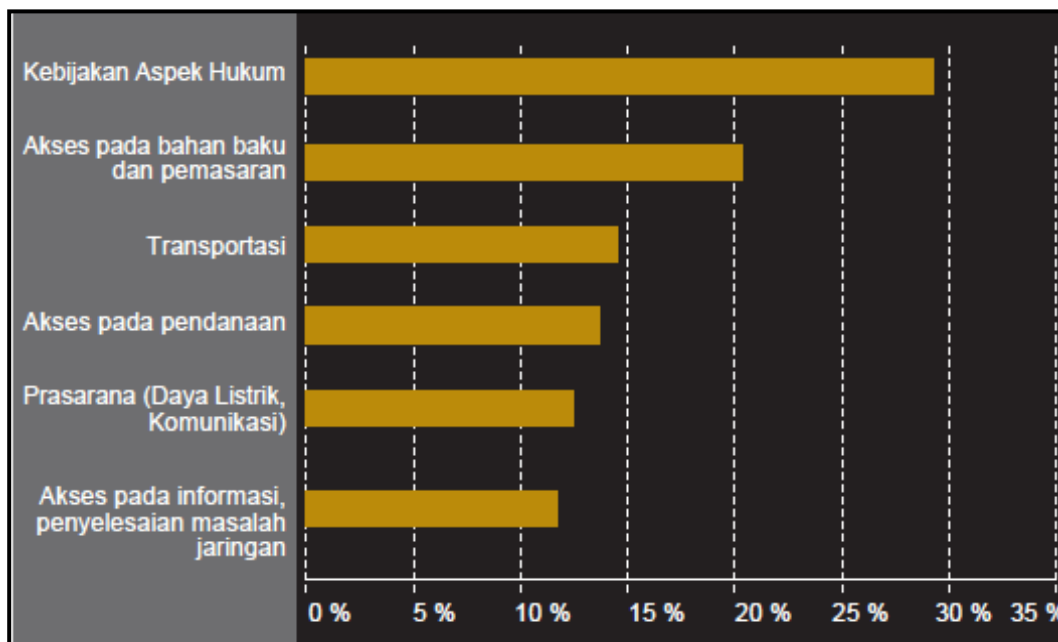
Sumber : IMD World Competitiveness Yearbook 2010

Grafik 1. Posisi Indonesia dalam Daya Saing Dunia

¹ IMD World Competitiveness Yearbook 2010, "The World Competitiveness Scoreboard 2010, Electronic Copy Available At: <http://www.imd.org/research/publications/wcy/upload/scoreboard.pdf> .Pdf

Paparan grafik di atas menunjukkan bahwa Indonesia masih jauh tertinggal dari negara-negara Asia lainnya yang sudah menduduki peringkat daya saing tinggi di tingkat dunia, seperti Hongkong, Singapura, dan Taiwan. Kondisi ini bukan berarti Indonesia harus pesimis, tetapi sebaliknya justru harus lebih memacu pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan daya saing Indonesia di dunia Internasional.

Eksistensi regulasi merupakan instrumen penting yang digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan publik pada berbagai bidang. Namun demikian, regulasi dapat menyebabkan timbulnya resiko, yakni dapat menghambat inovasi dan menimbulkan hambatan yang tidak perlu bagi dunia usaha terutama UKM, perdagangan, investasi dan peluang pasar global. Berbagai studi menyimpulkan bahwa regulasi yang tidak efisien, dan tidak diimplemen-tasikan dengan baik, akan mengurangi kinerja dunia usaha. Studi yang dilakukan Bank Dunia di 69 negara, misalnya, menyimpulkan bahwa regulasi merupakan kendala terbesar dalam menjalankan usaha di negara-negara anggota *Organization for Economic Cooperative and Development* (OECD). Kondisi lainnya dari hasil survey iklim usaha yang dilakukan GTZ-red tahun 2005² menunjukkan hal yang sama, yakni regulasi menjadi masalah utama bagi dunia usaha. Adapun eksistensi regulasi bagi dunia usaha dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber : Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, 2007

Grafik 2. Aspek-Aspek yang menjadi Masalah dalam Dunia Usaha

Sementara hasil studi yang dilakukan Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) tahun 2005 menunjukkan bahwa faktor penghambat kegiatan usaha

² Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, 2007, "Tatakelola Pemerintahan Daerah", Tangerang. Electronic copy available at: www.stan-star.ac.id

terutama adalah faktor kelembagaan (31%), terutama peraturan daerah, penegakan hukum, dan pelayanan birokrasi. Lebih lanjut, regulasi bukan hanya menghambat kegiatan usaha yang sedang berjalan, namun juga menghambat dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi bagi yang akan memulai kegiatan usaha. Data survey *Doing Bussines* pada tahun 2006 menunjukkan, jumlah prosedur yang cukup banyak (12 prosedur), dengan waktu yang sangat lama (97 hari) menyebabkan investor tidak begitu tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dari sisi biaya, masyarakat kita harus mengeluarkan 86.7% dari pendapatan per kapita per tahun untuk mengurus perijinan. Angka ini jauh melampaui biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha di Negara tetangga kita, misalnya Thailand (5.8%), Malaysia (19.7%) atau Singapore (0.8%). Hal yang sama terjadi pada besarnya modal minimum yang diperlukan untuk membuka usaha. Di Indonesia diperlukan 83.4% dari pendapatan per kapita, sementara di Negara tetangga kita umumnya dibawah satu persen. Adapun visualisasi perbandingan antar negara dalam hal memulai usaha dapat dilihat pada grafik berikut :

Negara	Prosedures (Jumlah)	Lama waktu (hari)	Biaya (% GNI per capita)	Modal minimum (% GNI per capita)
Indonesia	12	97	86.7	83.4
Cambodia	10	86	236.4	66.2
China	13	35	9.3	213.1
Philippines	11	48	18.7	1.8
Lao PDR	8	163	17.3	0.0
Solomon Islands	7	57	68.9	0.0
Papua New Guinea	8	56	28.2	0.0
Vietnam	11	50	44.5	0.0
Fiji	8	46	25.8	0.0
Thailand	8	33	5.8	0.0
Malaysia	9	30	19.7	0.0
United Kingdom	6	18	0.7	0.0
Hong Kong, China	5	11	3.3	0.0
Singapore	6	6	0.8	0.0

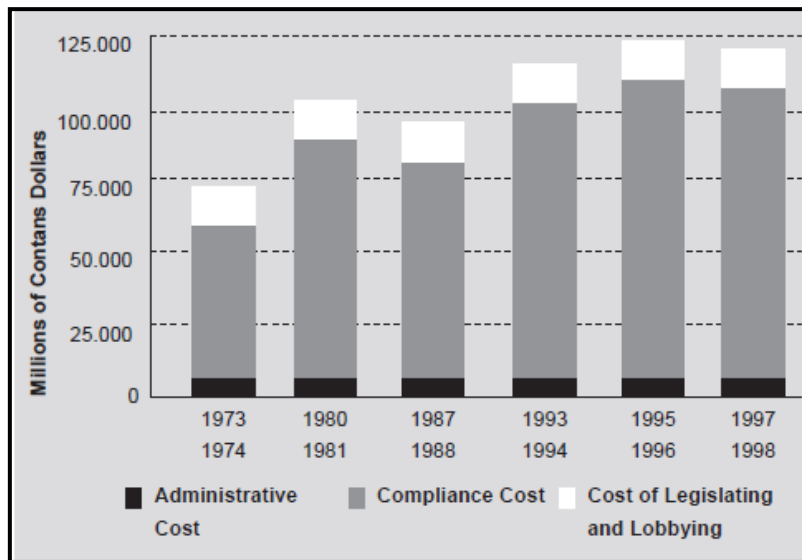
Sumber : Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, 2007³

Grafik 3. Perbandingan Antar Negara Dalam Memulai Usaha

Biaya yang sering dianggap sebagai komponen biaya regulasi adalah kategori biaya administrasi, yang mencakup biaya untuk melakukan kajian (*study*) dan analisis, pembuatan draft, pencetakan, dan biaya sosialisasi dan penegakan hukum. Biaya lain yang populer adalah kategori biaya legislasi dan lobby, yang mencakup biaya pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (Daerah) dan biaya yang terkait dengan

³ Ibid hal 80

kegiatan lobby agar regulasi tersebut diundangkan. Kedua komponen biaya tersebut diatas pada umumnya relatif kecil jika dibandingkan dengan kategori biaya ketiga, yaitu *compliance costs*, atau biaya yang harus dikeluarkan masyarakat maupun dunia usaha dalam mematuhi regulasi tersebut. Beban biaya terbesar akibat dari sebuah regulasi adalah biaya untuk mematuhi regulasi tersebut (*compliance cost*). Sebagai gambaran, perbandingan biaya regulasi, administrasi, legislasi, lobby dan compliance di Kanada dapat disimak pada grafik berikut :



Sumber : Jones & Graf, 2001 ⁴

Grafik 4. Biaya Regulasi

Grafik 4 menunjukkan perbandingan antara ketiga kategori biaya regulasi, yakni biaya administrasi, biaya legislasi dan lobby, dan biaya *compliance*, berdasarkan suatu studi di Kanada². Dari enam data mulai 1973/1974 sampai 1997/1998 diperoleh gambaran yang sama dimana *compliance cost* selalu menjadi bagian terbesar dari total biaya regulasi. Studi yang sama menemukan bahwa biaya untuk mentaati regulasi (*regulation's compliance cost*) ternyata melebihi nilai pajak pendapatan perusahaan dan laba perusahaan. Hal ini sekali lagi menegaskan bahwa regulasi membawa dampak biaya yang relatif besar bagi dunia usaha dan perekonomian secara umum.

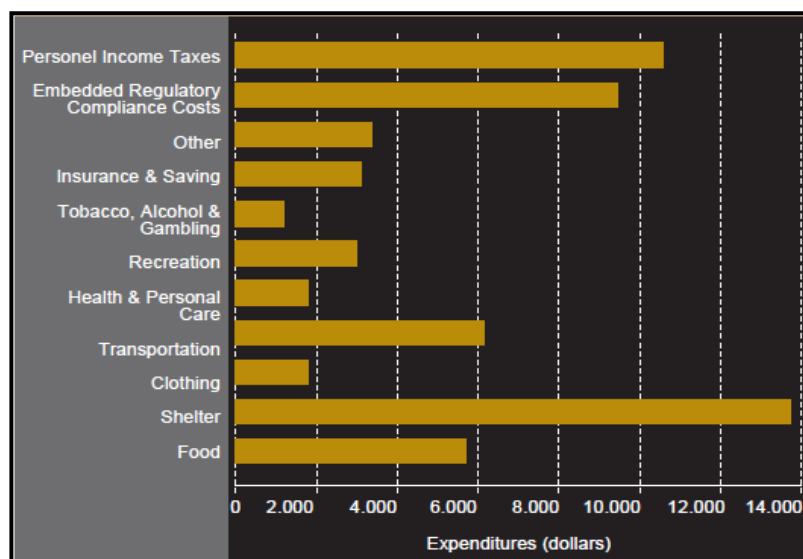
⁴ Laura Jones and Stephen Graf, 2001, *Canada's Regulatory Burden: How Many Regulations? At What Costs?*, The Fraser Institute, 2001



Sumber : Jones & Graf, 2001 ⁵

Grafik 5. Biaya Mentaati Regulasi VS Laba dan Biaya Pajak

Lebih lanjut fenomena lainnya menunjukkan bahwa, dari 11 kelompok pengeluaran rumah tangga, ternyata biaya untuk mematuhi regulasi menduduki peringkat ketiga setelah pengeluaran untuk tempat tinggal dan pajak pendapatan.



Sumber : Jones & Graf, 2001 ⁶

Grafik 6. Pengeluaran Rata-Rata Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga untuk *compliance cost* melebihi pengeluaran rumah tangga untuk makanan, transportasi, kesehatan, dan sebagainya, dengan demikian regulasi juga menjadi beban bagi rumah tangga. Paparan grafik 6 menunjukkan bahwa, regulasi demikian berdampak tidak hanya bagi dunia usaha, melainkan juga bagi rumah tangga. Walaupun demikian terdapat pertanyaan substansial sehubungan dengan dampak regulasi. Siapa saja yang harus menanggung dampak regulasi? Apa yang harus mereka

⁵ Ibid

⁶ Ibid

tanggung akibat dari regulasi? Gambaran ringkas mengenai siapa menanggung apa akibat dari regulasi ditunjukkan pada bagan berikut :



Bagan 1. Dampak Regulasi yang Buruk pada Berbagai Pihak

Paparan bagan 1 menunjukkan bahwa bagi pembayar pajak regulasi yang buruk berdampak pada biaya administrasi, bagi konsumen berdampak pada harga barang menjadi lebih tinggi. Dampak regulasi yang buruk bagi pengusaha menimbulkan adanya compliance cost yang besar dibanding pajak dan laba. Keberadaan regulasi yang buruk bagi pekerja dapat menimbulkan kehilangan pekerjaan, yang pada bidang ekonomi dapat menimbulkan kebangkrutan. Terakhir bagi masyarakat, dampak regulasi yang buruk menimbulkan perubahan standar hidup yang rentan untuk dipenuhi.

Perlunya Reformasi Regulasi Menjadi Regulasi yang Baik

Regulasi berpotensi membawa dampak negatif bagi kegiatan usaha dan perekonomian secara umum. Dengan demikian reformasi regulasi perlu dilakukan, dengan melakukan reviu terhadap regulasi yang sudah ada maupun rancangan regulasi yang akan diberlakukan. Ada empat alasan utama perlu dilakukan reviu terhadap regulasi, yaitu:

- **Regulasi bukan lagi kontes antara 'kekuatan baik' melawan 'kekuatan jahat'.**
Pada masa lampau regulasi sering dipandang sebagai kontes antara kekuatan baik (dalam hal ini, pemerintah) melawan kekuatan jahat (pengusaha). Nafsu jahat pengusaha harus dikontrol dengan peraturan pemerintah. Pada masa sekarang anggapan semacam ini tidak berlaku lagi. Saat ini, pengusaha adalah kekuatan baik yang menyumbang pajak untuk menjalankan pemerintahan, membantu pemerintah dengan menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kemakmuran warganya. Sementara itu, pada masa kini, tidak tertutup kemungkinan adanya pengaturan pemerintah yang justru menjadi 'kekuatan jahat', dalam arti menghambat atau bertentangan dengan penciptaan kemakmuran bagi masyarakat.

- **Regulasi yang tidak efisien menyebabkan kinerja ekonomi yang buruk.**
Hal ini terkait dengan adanya biaya untuk mematuhi regulasi (*compliance costs*), kompetisi, dan daya saing.
- **Terjadi kegagalan pasar versus kegagalan pemerintah.**
Alasan utama pemerintah mengeluarkan regulasi pada umumnya adalah karena adanya kegagalan pasar, antara lain terkait dengan eksternalitas & produksi *public good*. Namun demikian, pengaturan oleh pemerintah juga tidak selamanya baik, mengingat adanya kemungkinan kegagalan pemerintah, terutama terkait dengan informasi yang asimetris. Pemerintah tidak memiliki informasi yang cukup dibandingkan para pelaku usaha di lapangan. Dalam hal ini, pengaturan oleh pemerintah dapat menjadi lebih jelek (*inferior*) dibandingkan keputusan oleh ribuan pelaku usaha di lapangan.
- **Adanya persoalan dengan regulasi yang memberatkan kegiatan usaha.**
Persoalan tersebut antara lain adanya duplikasi dan akumulasi regulasi.

Sehubungan eksistensi regulasi bagi iklim usaha, maka regulasi yang kondusif merupakan syarat mutlak untuk perkembangan dunia usaha. Hanya dengan melalui penciptaan iklim yang kondusif, kegiatan perekonomian menjadi berkembang dan kegiatan investasi meningkat. Untuk menciptakan iklim usaha yang baik diperlukan regulasi yang baik pula. Ada tiga prinsip dasar untuk membuat regulasi yang baik (*good regulation*), yaitu:

- ***Minimum effective regulation.***

Prinsip ini menekankan bahwa pemerintah sebaiknya hanya mengeluarkan regulasi untuk hal-hal yang memang tidak dapat dicapai dengan cara lain (selain melalui penerbitan regulasi). Pemerintah tidak perlu mengatur hal-hal yang dapat dicapai dengan cara-cara non-regulasi, misalnya melalui mekanisme pasar atau penyelesaian secara sukarela (*voluntary*). Prinsip ini juga mensyaratkan bahwa jika pemerintah harus mengeluarkan regulasi untuk memecahkan suatu masalah, maka pemerintah harus memilih regulasi yang menimbulkan beban (kesulitan) paling sedikit bagi masyarakat (publik), dunia usaha dan pemerintah sendiri.

- ***Competitive neutrality.***

Prinsip ini mencerminkan pandangan umum bahwa mekanisme pasar kompetitif telah terbukti dapat menjadi sarana terbaik dalam menyediakan barang dan jasa kepada publik dengan harga yang paling rendah. Pandangan ini meyakini bahwa regulasi pemerintah yang menghalangi persaingan usaha yang sehat, atau regulasi yang menimbulkan biaya yang tidak perlu, akan merugikan perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu, prinsip ini menghendaki agar regulasi yang dikeluarkan pemerintah harus bersifat 'netral' terhadap kemampuan pelaku usaha dalam bersaing secara sehat dengan pelaku usaha lain. Pemerintah harus merevisi regulasi yang menimbulkan

hambatan bagi perusahaan tertentu, atau yang memberikan fasilitas (*privilege*) kepada perusahaan tertentu, sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk bersaing secara sehat.

- **Transparency (*participation*)**

Prinsip ini mencerminkan budaya demokratis yang menekankan bahwa setiap proses perumusan hukum dan kebijakan publik harus secara penuh memperhatikan aspirasi masyarakat. Regulasi yang dirumuskan melalui proses yang transparan, dan melibatkan partisipasi masyarakat, akan efektif dan memperoleh dukungan dari masyarakat dan para *stakeholders*. Melalui interaksi dengan *stakeholder* akan mendapatkan informasi yang lebih baik mengenai subjek regulasi maupun mengenai dampak yang mungkin timbul dari penerapan regulasi tersebut

Reformasi regulasi dalam rangka mencapai prinsip regulasi yang baik tersebut di atas pada umumnya dilakukan melalui prakarsa RIA atau *Regulatory Impact Assessment*. Analisis regulasi atau *Regulatory Impact Assessment* (RIA) merupakan metode untuk memastikan terciptanya regulasi yang baik, efisien dan efektif. Analisis RIA dapat dilakukan terhadap regulasi yang ada maupun yang sedang diusulkan. Dengan menerapkan metode RIA maka akan diperoleh kepastian bahwa regulasi yang ada memang benar-benar diperlukan oleh masyarakat (efisien, tidak ada regulasi yang tidak perlu), bahwa regulasi telah dibuat secara tepat sasaran (efektif), mempertimbangkan semua opsi, memperhitungkan manfaat dan biayanya, dan melibatkan *stakeholders* (transparan dan partisipatif). Rekomendasi OECD mengenai perbaikan kualitas regulasi pemerintah tahun 1995 menekankan peranan *Regulatory Impact Assessment* (RIA) dalam memastikan secara sistematis terpilihnya alternatif kebijakan yang paling efisien dan efektif. RIA adalah alat evaluasi kebijakan, sebuah metode yang bertujuan menilai secara sistematis pengaruh negatif dan positif regulasi yang sedang diusulkan ataupun yang sedang berjalan. RIA juga berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan, suatu metode yang secara sistematis dan konsisten mengkaji pengaruh yang ditimbulkan oleh tindakan pemerintah, dan mengkomunikasikan informasi kepada para pengambil keputusan.

Pengertian, Sejarah, Tujuan & Manfaat RIA

Regulatory Impact Analysis atau *Regulatory Impact Assessment* (RIA) adalah dokumen yang dibuat sebelum peraturan pemerintah yang baru diperkenalkan. Tujuan dari RIA adalah untuk menyediakan secara terperinci dan sistematis penilaian potensi dampak dari peraturan baru untuk menilai apakah kemungkinan peraturan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kebutuhan untuk RIA muncul dari fakta bahwa regulasi umumnya memiliki banyak dampak dan bahwa ini sering sulit untuk meramalkan tanpa studi yang rinci dan konsultasi dengan pihak-pihak yang terkena dampak. Pendekatan ekonomi masalah peraturan juga menekankan risiko tinggi yang biaya peraturan dapat melebihi manfaat. Dari perspektif ini, tujuan utama dari RIA adalah untuk memastikan

bahwa peraturan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang – yaitu, bahwa keuntungan akan melebihi biaya. RIA umumnya dilakukan dalam konteks komparatif, dengan berbagai sarana untuk mencapai tujuan dicari yang dianalisis dan hasilnya dibandingkan.

Dalam hal ini, manfaat RIA yaitu memastikan secara sistematis dalam menentukan pilihan kebijakan yang paling efisien dan efektif. Selain itu, RIA dapat mengukur menguji motif di balik pilihan kebijakan yang dibuat, yaitu apakah sebuah peraturan dibuat karena kepentingan publik luas atau lebih dominan menuruti kepentingan pembuat kebijakan atau golongan tertentu saja. RIA dapat memberikan alasan perlunya intervensi pemerintah, memberikan alasan bahwa regulasi adalah alternatif yang terbaik, memberikan alasan bahwa regulasi memberikan manfaat lebih besar dari biayanya, mendemonstrasikan bahwa konsultasi yang cukup telah dilakukan, dan menunjukkan mekanisme kepatuhan dan implementasi sesuai apa yang telah ditetapkan.

Regulatory Impact Analysis (RIA) atau Analisis Dampak Kebijakan pada awalnya merupakan alat kebijakan yang digunakan secara luas di negara-negara OECD. OECD atau *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) adalah organisasi internasional yang terdiri dari 30 negara yang menerima prinsip-prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas. Sebagian besar anggota OECD berpenghasilan tinggi ekonomi dengan IPM tinggi dan dianggap sebagai negara maju. OECD didirikan tahun 1948 sebagai organisasi kerjasama ekonomi yang dipimpin oleh Robert Marjolin dari Perancis, untuk membantu mengelola Marshall Plan untuk rekonstruksi Eropa setelah Perang Dunia II. Kemudian, keanggotaannya diperluas ke negara-negara non-Eropa.

Negara-negara anggota OECD mengakui bahwa kualitas peraturan sangat penting untuk kinerja ekonomi dan untuk meningkatkan kualitas kehidupan warganya. Maret 1995, OECD, membangun sebuah rekomendasi untuk meningkatkan kualitas peraturan pemerintah yang pertama yang dapat diterima secara internasional melalui serangkaian prinsip mengenai kualitas peraturan. Di antara rekomendasi tersebut, terdapat berbagai sistem perbaikan, termasuk rekomendasi referensi peraturan checklist untuk pengambilan keputusan dan komitmen yang kemudian diakomodasikan kedalam bentuk RIA. Dalam hal ini, RIA meneliti dan mengukur kemungkinan manfaat, biaya dan dampak peraturan baru atau diubah. RIA juga menyediakan alat untuk pembuat keputusan dengan data empiris dengan sebuah kerangka komprehensif yang dapat digunakan untuk menilai pilihan dan konsekuensi keputusan yang dimiliki. RIA digunakan untuk mendefinisikan masalah dan untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah itu dibenarkan dan sesuai.

Upaya untuk meningkatkan kualitas peraturan pada awalnya difokuskan pada masalah mengidentifikasi daerah-daerah, advokasi reformasi spesifik dan membuang peraturan memberatkan. Namun kemudian para pembuat kebijakan melihat bahwa

pendekatan untuk reformasi tidak mencukupi. Agenda reformasi negara-negara OECD mulai memperluas, untuk memasukkan berbagai kebijakan yang menyeluruh eksplisit, disiplin dan peralatan. Sehingga untuk menangkap kedinamisan lingkungan yang berkelanjutan-dari-seluruh pendekatan pemerintah dalam penerapan maka RIA kemudian diakomodasikan untuk dapat digunakan dalam mengintegrasikan kompetisi dan kriteria keterbukaan pasar.

Selanjutnya, dalam tahap membuat laporan menggunakan RIA adapun langkah yang umum yang digunakan oleh OECD yaitu pertama membandingkan pengalaman di Negara-negara OECD RIA; kedua, membandingkan sistem yang digunakan di berbagai Negara anggota; ketiga membandingkan perkembangan historis mereka; keempat membandingkan unsur-unsur sistem dan implementasi praktis mereka, dan kelima mengidentifikasi praktek terbaik saat ini di RIA. Sehingga, dari hal-hal tersebut dibuatlah satu set sepuluh praktek-praktek yang baik dalam desain dan pelaksanaan sistem RIA (daftar pertanyaan dalam metode RIA). Ini tidak berarti bahwa sistem satu pelaksanaan RIA yang diinginkan di semua negara di sepanjang waktu. Kelembagaan, sosial, budaya dan hukum negara mengharuskan perbedaan antara desain sistem yang berbeda. Praktek yang baik adalah titik awal untuk memaksimalkan manfaat dari RIA.

RIA memiliki 10 standar pertanyaan yang merupakan standar baku yang ditetapkan oleh OECD untuk merumuskan dan melaksanakan peraturan yang lebih baik. Seperti halnya standar dalam ISO 9001 yang digunakan untuk menetapkan standar kualitas mutu, standar RIA tersebut berfokus untuk memperbaiki proses pembuatan peraturan dalam mencapai tujuan peningkatan kualitas peraturan. Perlu digaris bawahi bahwa standar tersebut bukan untuk meningkatkan proses manajemen tetapi diharapkan sebagai sebuah instrumen kebijakan dapat mencapai tingkat kualitas peraturan yang mampu mengakomodasi semua pemangku kepentingan. Adapun penjelasan rinci dari daftar pertanyaan penyusunan RIA tersebut yaitu:

1. Apakah masalah dengan benar ditentukan?
Masalah yang harus dipecahkan harus tepat dinyatakan, memberikan bukti dari sifat dan besarnya, dan menjelaskan mengapa hal tersebut muncul (mengidentifikasi entitas insentif yang terkena).
2. Apakah dibenarkan tindakan pemerintah?
Intervensi pemerintah harus didasarkan pada bukti eksplisit bahwa tindakan pemerintah dibenarkan, mengingat sifat dari masalah, kemungkinan manfaat dan biaya tindakan (berdasarkan penilaian yang realistis efektivitas pemerintah), dan mekanisme alternatif untuk mengatasi masalah.
3. Apakah tindakan pemerintah tersebut merupakan peraturan yang terbaik ?
Regulator harus melakukan, di awal proses regulasi, sebuah informasi perbandingan berbagai peraturan dan non-peraturan instrumen kebijakan, mengingat masalah-masalah yang relevan seperti biaya, manfaat, efek distribusi dan persyaratan administrasi.
4. Apakah ada dasar hukum untuk peraturan?

Proses peraturan harus terstruktur sehingga semua keputusan peraturan ketat menghormati “rule of law”; itu adalah, tanggung jawab harus jelas untuk memastikan bahwa semua peraturan yang diperkenankan oleh peraturan tingkat yang lebih tinggi dan konsisten dengan kewajiban perjanjian internasional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang relevan seperti kepastian, proporsionalitas dan persyaratan prosedural yang berlaku.

5. Dimana tingkatan (level) pemerintahan untuk tindakan ini? Regulator harus memilih tingkat yang paling tepat dari pemerintah untuk mengambil tindakan, atau birokrasi yang terlibat, sehingga perlu dirancang sistem yang efektif untuk koordinasi antartingkat pemerintahan.
6. Apakah dampak regulasi/kebijakan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan? Regulator harus memperkirakan total biaya dan manfaat yang diharapkan dari setiap peraturan usulan dan alternatif, dan harus membuat perkiraan tersedia dalam format yang dapat diakses para pengambil keputusan. Biaya tindakan pemerintah harus dapat dibenarkan oleh manfaat sebelum tindakan diambil.
7. Apakah efek yang ditimbulkan menjangkau seluruh masyarakat? Sejauh distributif dan nilai-nilai ekuitas dipengaruhi oleh intervensi pemerintah, regulator harus membuat transparan peraturan distribusi biaya dan manfaat di kelompok-kelompok sosial.
8. Apakah regulasi jelas, konsisten, dipahami dan dapat diakses oleh pengguna? Regulator harus menilai apakah peraturan akan mungkin dipahami oleh pengguna, dan untuk itu harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa struktur teks dan aturan sejelas mungkin.
9. Apakah semua pihak yang berkepentingan memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan-pandangan mereka?
Peraturan harus dikembangkan secara terbuka dan transparan, dengan prosedur yang tepat yang efektif dan tepat waktu masukan dari pihak-pihak yang tertarik seperti bisnis yang terkena dampak dan serikat buruh, kelompok-kelompok kepentingan lainnya, atau tingkat pemerintahan lainnya.
10. Bagaimana kepatuhan akan dapat tercapai?
Regulator harus menilai insentif dan lembaga-lembaga melalui peraturan yang akan berlaku, dan harus merancang strategi pelaksanaan tanggap yang membuat penggunaan terbaik dari mereka.

RIA Sebagai Metode Proses Kebijakan yang Partisipatif

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa, RIA dapat menguji motif di balik pilihan kebijakan yang dibuat, sehingga kebijakan bersifat populis dengan melibatkan bersama antara regulator dengan konsultasi dengan para stakeholder.

Analisis risiko, biaya, dan manfaat serta penerapan transparansi dan akuntabilitas bisa menguji kepentingan dominan di balik kebijakan. Regulatory Impact Analysis (RIA) sebagai alat evaluasi kebijakan, bertujuan menilai secara sistematis pengaruh negatif dan positif terhadap regulasi yang sedang diusulkan atau yang sedang berjalan. RIA sebagai sebuah metode dalam penyusunan kebijakan, lebih mengakomodasi keinginan dan kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan keinginan pemerintah memberikan pengaturan terhadap sesuatu masalah yang terjadi di masyarakat.

Ada beberapa alasan mengapa dalam penyusunan kebijakan membutuhkan partisipasi masyarakat. Pertama alasan filosofis demokratis, artinya setiap kebijakan yang akan diberlakukan terhadap pihak-pihak tertentu dalam masyarakat wajib dimintakan pendapat dan masukannya, bahkan keberatan mereka perlu diperhatikan oleh pembuat kebijakan. Kedua, alasan praktis, kemampuan wawasan, dan penguasaan pengetahuan dari penentu kebijakan ada batasnya sehingga perlu melibatkan masyarakat. Ketiga alasan efektivitas pelaksanaan. Asumsinya makin terlibat masyarakat dalam proses pembentukan, makin tinggi rasa memiliki serta dukungan masyarakat terhadap suatu kebijakan, sehingga mendorong efektivitas pelaksanaan dan penegakannya.

Tiga pilar alasan tersebut sejalan dengan metode RIA dalam mewujudkan kebijakan daerah yang partisipatif. Karena itu, metode RIA sebagai instrumen untuk mewujudkan kebijakan daerah dalam bentuk regulasi memiliki dua arah yang seimbang yaitu top down dan bottom up sehingga komunikasi antara masyarakat dan pemerintah senantiasa terbangun.

Pendekatan ini sangat penting untuk diadopsi dalam rangka mendorong terciptanya good regulatory governance, di mana regulasi dapat menjadi alternatif untuk mendapatkan solusi terbaik. Ini penting karena kenyataannya regulasi cenderung menjadi beban bagi stakeholder yang pada akhirnya menjadi bumerang bagi pemerintah dan masyarakat luas. Ini karena regulasi seringkali dibuat “asal jadi” tanpa memperhatikan berbagai aspek yang ada di masyarakat.

Metode RIA merupakan satu bentuk telaah terhadap aturan main pemerintah dengan lebih memperhatikan problem yang terjadi di masyarakat (problem focus). Pelibatan masyarakat/publik sebagai stakeholder menjadi suatu keniscayaan dalam melakukan review/telaah terhadap regulasi berbasis RIA. RIA sebagai sebuah metode pengkajian regulasi disusun secara sistematis dan praktis. Metode ini mudah diimplementasikan bagi pemerintah yang memiliki good will untuk memperbaiki iklim regulasi yang berdampak kuat terhadap iklim ekonomi di daerah, terutama terhadap penataan iklim investasi yang baik. Dukungan dari pemangku kebijakan (eksekutif dan legislatif) menjadi penting untuk mendukung kinerja Tim RIA di daerah.

Tahapan-Tahapan RIA

Adapun proses sistematis RIA dalam menganalisis serta mengkomunikasikan dampak yang ada dari peraturan baru mencakup:

1. **Merumuskan Masalah.**

Analisis atas suatu regulasi dimulai dengan merumuskan permasalahan yang ingin diselesaikan melalui penerbitan regulasi. Dalam hampir semua kasus, penerbitan regulasi ditujukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Oleh karena itu, untuk dapat mengetahui apakah regulasi tersebut baik atau tidak, terlebih dahulu harus dilakukan perumusan masalah. Dalam tahap ini, pembuat regulasi menjelaskan masalah yang mendasari kenapa pemerintah perlu menerbitkan regulasi. Pertanyaan yang perlu dijawab dalam tahap ini adalah: Apakah masalah yang ingin diselesaikan? Apakah masalah yang ingin diselesaikan benar-benar atau hanya gejalanya? Apakah tidak terdapat masalah yang lebih mendasar? Apa akar penyebab timbulnya masalah? Bagaimana persepsi para *stakeholders* (pihak yang terkait) terhadap masalah tersebut?

2. **Mengidentifikasi Tujuan.**

Tahap ini dilakukan untuk mengetahui sasaran yang ingin dicapai dari penerbitan suatu regulasi. Dalam beberapa kasus, sasaran suatu regulasi tentu saja adalah untuk menyelesaikan ‘masalah’ yang sudah diidentifikasi pada tahap 1 di atas. Namun ada kalanya, suatu ‘masalah’ mungkin cukup pelik dan rumit sehingga tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu tindakan (regulasi) saja. Dalam keadaan demikian, regulasi biasanya dibuat hanya ditujukan untuk mengatasi sebagian dari masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, harus diidentifikasi dengan jelas sasaran yang ingin dicapai oleh regulasi tersebut. Dalam tahap identifikasi tujuan, hal yang harus diketahui adalah: Apa tujuan (sasaran) menerbitkan regulasi? Apakah sasaran regulasi tersebut untuk menyelesaikan sebagian atau seluruh permasalahan yang dihadapi? Selain itu, harus diketahui juga apakah pemerintah memiliki kewenangan mengeluarkan regulasi tersebut, dan apakah regulasi tersebut konsisten dengan undang-undang dan peraturan lainnya.

3. **Menyusun Alternatif.**

Pada tahap ini, dilakukan pengembangan alternatif tindakan (opsi) yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan (sasaran) yang telah diidentifikasi. Fokus analisis dalam tahap ini adalah melihat apakah seluruh opsi (alternative tindakan) yang tersedia telah dipertimbangkan secara baik. Hal lain yang harus diperhatikan adalah apakah terdapat cara (alternatif tindakan) lain yang lebih baik dan lebih jelas yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan? Dengan melihat berbagai alternatif penyelesaian masalah, dapat dibandingkan dan dipertimbangkan alternatif mana yang lebih baik dalam mencapai hasil yang

diinginkan. Alternatif tidak melakukan apa-apa (*do nothing*) juga menjadi salah satu opsi yang harus dipertimbangkan.

4. **Analisis Manfaat dan Biaya.**

Pada tahap ini, dilakukan assessment atas manfaat dan biaya (keuntungan dan kerugian) untuk setiap opsi atau alternatif tindakan yang penting, dilihat dari sudut pandang pemerintah, masyarakat, konsumen, pelaku usaha, dan ekonomi secara keseluruhan. Beberapa pertanyaan yang harus dijawab pada tahap ini adalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan (implementasi) regulasi dalam prakteknya? Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu dilakukan diskusi dengan pihak-pihak yang terpengaruh oleh regulasi, dan melakukan pengumpulan data.
- b. Manfaat apa saja yang diperoleh dari regulasi tersebut?
 - Apakah membuahkan hasil (manfaat) sesuai dengan yang diinginkan?
 - Apakah menghasilkan manfaat lainnya? Jika ya, apa manfaat tersebut?
- c. Biaya (dampak) apa saja yang timbul dari implementasi regulasi tersebut?
 - Biaya (dampak) apakah yang harus ditanggung oleh pemerintah, masyarakat, konsumen, pelaku usaha, dan ekonomi secara keseluruhan?
- d. Apakah manfaat regulasi lebih besar dari biayanya?

Setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan opsi tindakan, dan setelah membandingkan berbagai biaya dan manfaat dari opsi tersebut, tahap selanjutnya adalah memilih opsi tindakan yang terbaik untuk mencapai sasaran dan menyelesaikan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam tahap ini harus dipastikan bahwa bahwa semua *benefits/costs* sudah dibandingkan, dan memilih opsi yang paling efisien dan efektif.

5. **Konsultasi Publik.**

Regulasi yang baik adalah regulasi yang secara terus-menerus dikomunikasikan kepada para *stakeholders*, terutama bagi pelaksana yang menjalankan regulasi di lapangan. Konsultasi ini harus dilakukan dari mulai tahap awal perumusan regulasi sampai dengan tahap implementasi dan monitoring pelaksanaan regulasi. Dalam langkah-langkah RIA yang digunakan, konsultasi publik sudah mulai dilakukan pada tahap identifikasi masalah. Konsultasi pada tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa yang ditangani adalah masalah yang tepat. Selain itu, konsultasi ini juga untuk memastikan bahwa persepsi tim yang melakukan RIA terhadap masalah yang dihadapi sama dengan persepsi masyarakat, pelaku usaha, maupun *stakeholders* lainnya.

Konsultasi pada tahap indentifikasi alternatif (tahap-3) terutama bertujuan untuk mendapatkan masukan mengenai opsi yang dapat dipilih, dan untuk menguji apakah opsi tertentu dapat dijalankan secara layak. Dalam tahap

analisis manfaat-biaya (tahap-4), konsultasi terutama bertujuan untuk, mendapatkan masukan mengenai biaya (kerugian atau kesulitan) dan manfaat (keuntungan) dari setiap opsi, dan untuk mendapatkan konfirmasi apakah biaya atau manfaat yang diharapkan benar-benar terwujud dalam prakteknya.

6. **Memilih Alternatif Terbaik.** Penentuan opsi dengan melakukan seleksi kebijakan yang paling efektif / efisien pilihan serta advokasinya
 7. **Strategi Implementasi.** Melakukan rencana strategi implementasi kebijakan
- Adapun tahapan dalam RIA secara umum dapat dilihat pada bagan berikut :



Bagan 2. : Proses RIA

Lebih lanjut contoh-contoh penerapan tahapan RIA yang diambil dari Manual RIA, The Asia Foundation 2007 pada skala internasional, nasional dan daerah dapat dipaparkan pada halaman lampiran.

Metode-Metode Analisis dalam RIA

Berikut adalah metode-metode Analisis yang sering dipakai dalam menganalisis dokumen RIA

1. ***Soft Benefit-Cost Analysis and Integrated Analysis.***

Analisis didasarkan pada kerangka trade-off yang diidentifikasi dan keuntungan yang maksimal di berbagai tujuan kebijakan sehingga menghasilkan peraturan yang memaksimalkan keuntungan terbesar dengan solusi biaya terendah.

2. *Cost-Effectiveness Analysis.*

Kebijakan RIA dinyatakan dengan pendekatan-pendekatan alternatif harus dipilih berdasarkan efektifitas biaya. Sehingga analisis kebijakan RIA harus berisi kriteria yang jelas untuk memandu pilihan alternatif.

3. *Partial Analysis.*

Analisis ditekankan untuk menghindari risiko bias dalam tiap kelompok. Analisis parsial menekankan bahwa semua dampak spesifik akan diintegrasikan ke dalam kerangka analisis yang lebih besar.

4. *Risk Assessment and Uncertainty Analysis*

Analisis ditekankan pada sebuah pencegahan sebagai pilihan kebijakan dengan asas ketidakpastian, penilaian resiko serta sensitivitas peraturan.

Soft Benefit-Cost Analysis and Integrated Analysis⁷

Dorongan nilai ekonomi yang selalu disukai dari RIA adalah analisis biaya manfaat (*benefit cost analysis*) BCA sebagai metode yang paling inklusif dan bertanggung jawab secara sosial terhadap pengambilan keputusan publik. BCA adalah metode lama digunakan oleh pemerintah dalam menilai proyek investasi seperti jalan dan bendungan, dan disesuaikan dengan masalah pengaturan kebijakan pada tahun 1970an.

Walaupun ada kekhawatiran terus menerus terhadap over-monetisasi dari dampak yang dapat secara absah ditunjukkan dalam metrik lain, ini merupakan masalah yang mudah ditemui. Mainstream analisis biaya-manfaat seperti yang digunakan dalam RIA saat ini adalah bentuk *soft* dari BCA, di mana metrik kuantitatif digabungkan dan disajikan secara sistematis. Tidak ada negara dimana BCA modern menekankan pada monetisasi dari semua analisis manfaat-biaya.

Soft BCA adalah metode terbaik disesuaikan untuk melindungi berbagai kepentingan. Salah satu keuntungan utama dari kerangka biaya manfaat adalah bahwa mereka mencakup dampak yang luas di seluruh spektrum lingkungan sosial ekonomi, maka dalam ranah ini sesuai dengan tuntutan politik universal bahwa metode RIA ditujukan pada kepentingan umum yang lebih luas. BCA juga menawarkan keuntungan penting dari perbandingan biaya dan manfaat yang terjadi di berbagai titik dalam suatu waktu.

Kerangka BCA adalah bentuk yang paling inklusif dan terpadu dari RIA dan memberikan informasi yang terbaik untuk membuat keputusan kebijakan yang sehat.

⁷ Opcit, Jacob, H Scoot, 2007, hal 28

Faktanya bahwa negara-negara yang kukuh dengan standar perlindungan lingkungan dan mendorong ke arah kerangka kerja RIA yang lebih terpadu, berdasarkan *soft* BCA dan secara kuat menekankan pada ukuran kuantitatif dari dampak, menunjukkan bahwa kerangka tersebut telah sepenuhnya konsisten dengan nilai-nilai yang tinggi pada perlindungan sosial dan lingkungan.

Tapi secara umum, pergerakan ke arah bentuk-bentuk RIA yang lebih terpadu melalui *soft* BCA hanya satu alur dalam tren metode RIA saat ini. Tren RIA saat ini menunjukkan diversifikasi, kadang-kadang bahkan terpisah, di antara beberapa metode analisis yang tercantum di atas. Alasan utama penyimpangan metode ini adalah bahwa RIA adalah memasuki arus utama kebijakan, dan mendapat tekanan dari banyak kelompok yang kini memahami bahwa mereka memiliki kepentingan langsung dalam RIA. Artinya, RIA sedang demokratisasi dari asal-usulnya sebagai alat yang agak teknokratis menjadi alat politik dan kebijakan. Tabel 1 di bawah ini menunjukkan bagaimana sumber yang berbeda kepentingan dalam RIA mengarah pada tujuan yang berbeda dan jenis analisisnya.

Tabel 1. Tekanan Pada Metode RIA⁸

Tekanan pada RIA	Tujuan	Metode Analisis
Ekonomi Neo Klasik Ekonomi	Maksimalisasi kesejahteraan sosial di antara beberapa kebaikan dan keburukan (<i>Pareto optimum</i>)	Analisis biaya manfaat mengintegrasikan penilaian dampak yang meliputi beberapa tujuan kebijakan
New Public Management	Disiplin pada biaya dan kinerja	Analisa Biaya Biaya-efektifitas pada berbagai pilihan
Daya Saing kebijakan mikro ekonomi kebijakan	Meminimalkan Biaya usaha	Dampak Bisnis, uji SME, uji beban administrasi
Tekanan social Konsensus kelompok kepentingan	Penilaian yang tinggi tentang dampak pada kelompok-kelompok tertentu	Analisis distribusi, analisis parsial

Sumber : (Jacob, 2007)

Diversifikasi metode bukanlah tren buruk sepanjang metode RIA lainnya bertindak sebagai masukan ke dalam kerangka kerja biaya-manfaat yang lebih luas. Ada alasan yang disampaikan untuk beberapa aspek pada diversifikasi analitis seperti kekhawatiran tentang bagaimana peraturan akan mempengaruhi tujuan sosial yang lebih luas dan keprihatinan tentang dampak yang tidak proporsional dari biaya regulasi tetap pada usaha kecil. Dalam beberapa kasus, fokus pada jenis dampak yang spesifik di masa lalu. Pada kasus tersebut, analisis parsial dapat dilihat sebagai upaya untuk menyeimbangkan masukan ke dalam keputusan regulasi yang baik.

⁸ Opcit, Jacob, H Scoot, 2007, hal 29

Namun, di beberapa negara, diversifikasi didorong sebagian oleh isu-isu daya saing dan sebagian oleh niat politik untuk melayani konstituen vokal. Hal ini telah menimbulkan fragmentasi metode ke dalam persaingan agenda kebijakan. Dalam kasus seperti RIA dilemahkan oleh ketergantungan yang lebih pada metode analisis parsial, ketidakpastian dan ketidaksesuaian yang tidak didasarkan pada pandangan logis penggunaan RIA didalam kebijakan publik. Ketergantungan pada metode tersebut menciptakan risiko kesalahan sistematis dalam kebijakan publik. Ketergantungan pada metode tersebut menciptakan risiko kesalahan sistematis dalam pengambilan kebijakan. Seperti kesalahan mengurangi manfaat dari tindakan pemerintah dan meningkatkan kemungkinan kegagalan kebijakan.

Kesimpulan di sini adalah bahwa pemerintah harus mengembangkan apa yang oleh Komisi Eropa disebut analisis dampak terpadu/*integrated impact analysis* (IIA), di mana dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dinilai bersama-sama dalam kerangka biaya manfaat secara transparan. Dalam pendekatan ini RIA menjadi kerangka di mana untung-rugi (trade-off) diidentifikasi dan manfaat dimaksimalkan di berbagai tujuan kebijakan.

Isu penting lainnya adalah analisis kualitas dalam metode yang dipilih. Di negara-negara yang dengan investasi lebih dalam RIA, ada upaya berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas RIA melalui kuantifikasi yang lebih, persyaratan yang lebih tepat, dan kualitas data yang lebih tinggi. Di Australia misalnya, sejak tahun 1990an pemikiran pola ORR telah semakin meningkatkan kebutuhan informasi minimum dari RISs, dengan tujuan meningkatkan kualitas RISs dan kegunaannya untuk para pengambil keputusan. Misalnya, untuk usulan peraturan yang menghasilkan tambahan biaya pelaksanaan pada bisnis, sejak 1 Juli 2004, pola ORR telah menyarankan regulator bahwa data kuantitatif tentang biaya tersebut harus disertakan dalam RISs (atau secara alternatif, pernyataan yang jelas dibuat bahwa regulator tidak mampu memperkirakan biaya tersebut)⁹.

Demikian pula Pedoman OMB's Amerika Serikat untuk RIA meningkatkan penekanan pada analisis efektivitas biaya dan analisis biaya manfaat. Secara khusus pedoman baru tersebut menekankan pada monetisasi dan kriteria 'keuntungan bersih' seraya memperjelas penyajian faktor non kuantitas. Analisis biaya efektivitas mengamankan untuk semua kepala bidang kesehatan dan standar keselamatan untuk memberikan perbandingan yang lebih jelas tentang biaya untuk pengurangan risiko. Langkah ini dimaksudkan untuk meningkatkan insentif bagi regulator untuk menetapkan prioritas yang ditujukan pada risiko yang lebih penting atau risiko yang dapat dikurangi dengan biaya lebih rendah, dan mengurangi insentif yang ditujukan pada pencapaian yang tinggi tetapi kurang penting dengan biaya yang lebih tinggi.

⁹ ORR (Office Regulation Review), 1998, *A Guide to Regulation*, Government of Australia, 2nd edn, December

Cost-Effectiveness Analysis¹⁰

Analisis efektivitas biaya atau *Cost-Effectiveness Analysis* (CEA) adalah teknik yang digunakan untuk membandingkan biaya dari berbagai pilihan yang berbeda dengan output yang sama/mirip atau menguntungkan. Ini adalah metode yang berguna namun terbatas karena tidak menentukan jika tindakan tersebut mampu menarik manfaat (yang mana manfaat membenarkan biaya) dan tidak menyelesaikan pilihan tingkat manfaat yang optimal. Tetapi dapat mengurangi biaya pemecahan masalah ke tingkat terendah. Artinya, sedangkan BCA membantu pemerintah memutuskan apa yang harus dilakukan, CEA membantu pemerintah memutuskan bagaimana melakukannya. Salah satu fungsi utama CEA adalah untuk membandingkan secara sistematis dan transparan dari banyaknya pilihan. Membandingkan pilihan adalah salah satu tugas paling sulit RIA. Pendekatan yang paling ketat dan intensif dalam data digunakan oleh Australia yang mengharuskan bahwa RIA itu 'menilai opsi yang layak dan termasuk biaya-manfaat, dampak dan analisis risiko dari setiap opsi' (pola ORR, 1998). Amerika membutuhkan 'pendekatan keuntungan bersih' yang (*soft*) luas: 'dalam memilih diantara alternatif pendekatan regulasi, lembaga harus memilih pendekatan yang memaksimalkan keuntungan bersih, termasuk potensi ekonomi, kesehatan lingkungan, publik dan keselamatan, dan keuntungan lainnya; dampak distributif, dan ekuitas'(OMB, 2003)¹¹.

Badan Pengaturan Kebijakan di Kanada (*Canada's Regulatory Policy*) ini juga sangat kuantitatif yang mengadopsi standar 'keuntungan bersih' untuk memastikan bahwa penggunaan kekuasaan regulasi pemerintah yang merupakan hasil keuntungan bersih terbesar bagi masyarakat Kanada dan itu dibutuhkan sebagai alternatif solusi regulasi, harus dianalisa untuk memastikan paling efektif dan efisien yang akan dipilih (Pemerintah Kanada, 1999)¹²

Penentuan waktu dari proses RIA juga penting untuk kualitas RIA dalam membandingkan alternatif. Hal ini direview dari pengalaman di negara-negara maju menunjukkan bahwa penentuan waktu pada RIA, mungkin lebih daripada metode RIA, adalah penentu paling penting dari seberapa baik penilaian opsi dilakukan. Anehnya, banyak negara tidak mengharuskan RIA dilakukan sebelum pilihan-pilihan tersebut dipertimbangkan dan dipilih. RIA's yang bertahap tersebut tampaknya mendorong penggunaan RIA sebelumnya dan meminjamkannya untuk pertimbangan lebih baik dan memilih dari berbagai pilihan. Untuk alasan tersebut pembahasan sebelumnya pada waktu awal RIA dan konsultasi publik sangat penting untuk penilaian lebih lengkap dan lebih jujur alternatif.

¹⁰ Opcit, Jacob, H Scoot, 2007, hal 30-31

¹¹ Lihat OMB (Office Management and Budget) (2003), '*Circular A-4, Subject: Regulatory Analysis*', Washington DC:Government of the US

¹² Lihat Government of Canada (1999), '*Regulatory Policy*', Privy Council Office

Partial Analysis¹³

Semua dampak tidaklah sama. Sangat dibolehkan dalam metode RIA untuk memberikan bobot yang berbeda untuk berbagai jenis dampak. Metode analisis mandiri memberikan sedikit panduan untuk menetapkan bobot yang berbeda dan oleh karena itu keputusan untuk menimbang beberapa dampak lebih berat dibanding yang lain pada umumnya merupakan keputusan politik yang didasarkan pada prioritas kebijakan dan nilai-nilai. Masalah penyebaran selalu sulit untuk ditangani dalam kerangka RIA karena biasanya analisa kesulitan untuk melacak efek khusus sebuah peraturan tunggal pada kelompok tertentu melalui interaksi masyarakat yang kompleks, lingkungan dan pasar.

Australia RIA mensyaratkan bahwa efek distribusi didokumentasikan dari pendekatan ekonomi yang luas daripada penekanan dalam apriori terhadap kelompok tertentu. Di Australia, RIA harus mendokumentasikan yang mana kelompok pemanfaat dari peraturan dan yang mana kelompok pembayar biaya langsung dan tidak langsung dari implementasi. Pendekatan yang serupa diambil dalam Komisi Eropa dan di Amerika Serikat dimana penekanannya adalah menempatkan pendekatan yang terintegrasi dan perbandingan manfaat dan biaya secara keseluruhan daripada pembobotan yang tidak transparan dari dampak yang dipilih. RIA Kanada menangani distribusi efek yang sama.

Namun banyak negara yang menuntut bahwa RIA menilai efek khusus tentang gender, pembangunan daerah dan efek distributif lainnya. Implikasinya adalah bahwa regulator harus menghindari penempatan biaya pada kelompok rentan atau bahkan biaya yang tidak proporsional dan manfaat yang bersebrangan dengan kelompok.

Pada awalnya nilai tren ini tampaknya patut dipuji, tetapi bermasalah dalam praktek. Asumsi kunci dari analisis kesejahteraan sosial adalah bahwa komitmen yang konsisten untuk kebijakan publik yang lebih baik sehingga akan menghasilkan hasil yang lebih pada biaya yang lebih rendah, pada waktu berikutnya, menghasilkan kebijakan makro dan hasil makro ekonomi yang lebih baik. Untuk alasan tersebut penggunaan RIA secara konsisten harus dengan sendirinya memiliki pengaruh makro positif yang bermanfaat bagi setiap orang dalam masyarakat. Ini tidak berarti, bahwa dampak ekonomi makro untuk intervensi peraturan tunggal dapat dinilai atau dikelola oleh regulator. Intervensi Micro adalah bagian dari sistem ekonomi yang kompleks dan menelusuri dampak marjinal dari sebuah intervensi biasanya mustahil. Apa RIA benar-benar lakukan ketika mereka mencoba tugas tersebut untuk mengidentifikasi efek dari jangka waktu yang sangat pendek dan statis pada industri tertentu. Sekundernya, efek jangka panjang dan dinamis diabaikan karena hal tersebut tidak dapat dinilai. Oleh karena itu hasil praktis dan kurang berhasilnya jenis analisis ini adalah untuk mendorong pengambilan kebijakan terhadap hasil statis dan jangka pendek, yang sering mengarah pada solusi kebijakan yang salah.

¹³ Opcit, Jacob, H Scoot, 2007, hal 31-33

Jenis lain dari analisis parsial adalah tes SME. Keperluan tes spesifik sebagai bagian dari RIA menunjukkan komitmen politik untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi kelompok-kelompok tertentu, seperti kekhawatiran daya saing bagi sektor bisnis. Dalam hal ini, khusus RIA tes sering kali setara dengan pelayanan konstituen. SME dan uji dampak bisnis selalu populer untuk alasan ini. Jenis pengujian ini dapat meningkatkan perhatian untuk biaya regulasi yang tidak proporsional tentang SME tetapi merusak jika mengalihkan keputusan kebijakan publik jauh dari orang-orang yang menghasilkan keuntungan bersih lebih tinggi terhadap mereka yang kurang menguntungkan secara umum meskipun lebih bermanfaat bagi kepentingan bisnis atau usaha kecil. Di Amerika Serikat dan di Uni Eropa jenis-jenis tes secara eksplisit dimasukkan dalam kerangka BCA terpadu dan tidak dianggap sebagai tes terpisah atau eksternal.

Contoh yang paling menonjol muncul analisis parsial adalah biaya beban administrasi selalu menjadi elemen populer dari reformasi regulasi tetapi telah diambil, pada peran yang tidak proporsional dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2002, ketika Pemerintah Belanda berkomitmen untuk mengukur dan mengurangi beban administrasi pada bisnis dengan 25 persen menggunakan metode yang disebut 'model biaya standar' atau *The Standard Cost Model (SCM)*, yang merupakan metode *bottom-up* untuk mengukur waktu yang dibutuhkan untuk mematuhi persyaratan administrasi dan ekstrapolasi dari perusahaan ke seluruh ekonomi. Beberapa negara sedang mengembangkan metode ini untuk mereka gunakan sendiri dan SCM menyebar dengan cepat.

Komisi Eropa memutuskan pada Oktober 2005 untuk mengembangkan sebuah metodologi Uni Eropa bersama berdasar pada SCM dan mengintegrasikan metode yang menjadi pedoman sendiri RIA. Analisis akan menilai biaya bersih administrasi (biaya baru dikenakan dengan menekan pengurangan biaya tindakan sebagaimana tindakan yang sama di Negara Uni Eropa atau Level Negara anggota). Pendekatan 'biaya bersih'/net cost dibenarkan sepanjang konsisten dengan pedoman Komisi RIA dan prinsip-prinsip panduan OECD untuk kualitas regulasi dan unjuk kinerja (CEC, 2005c)¹⁴

Pada tahun 2005, OECD's proyek Red Tape Scoreboard mulai mengembangkan metode untuk mengukur beban administrasi di seluruh anggota OECD dengan menggunakan SCM sebagai titik awal. Bahayanya adalah bahwa analisis ini dan sebagian lainnya akan menjadi sangat dominan sehingga mereka akan membanjiri analisis terpadu yang sangat penting untuk menyeimbangkan berbagai dampak dan manfaat dengan biaya. Jika tes beban administratif mengambil bobot yang tidak seimbang dalam RIA itu akan menghambat penggunaan informasi dan pengungkapan sebagai alternatif pada peraturan, karena alternatif ini biasanya menerapkan beban administrasi yang relatif

¹⁴ Lihat CEC, 2005c, 'An EU Common Methodology for Assessing Administrative Cost Imposed by Legislation', Communication from the Commission, COM (2005) 518 Final, Brussels

tinggi. Hal ini secara sistematis akan bias dalam pengambilan keputusan dan menjauh dari solusi regulasi di mana persyaratan administrasi adalah solusi yang paling efisien.

Tinjauan ini sangat menyarankan bahwa analisis parsial memperkuat RIA jika hal tersebut memperkuat perhatian pada dampak penting yang telah diabaikan, tetapi hanya jika dampak-dampak tersebut dianggap dalam kerangka analisis terpadu. Artinya, analisis parsial akan menurunkan kualitas RIA jika tidak diintegrasikan ke dalam kerangka analisis yang lebih luas. Artinya, analisis parsial berguna terutama sebagai input ke dalam RIA yang lebih luas. Di sisi lain, analisis parsial akan menurunkan kualitas RIA jika tidak diintegrasikan ke dalam kerangka analisis yang lebih luas dan karena itu diberi bobot yang berlebihan dalam keputusan kebijakan. Ketergantungan yang berlebihan pada analisis parsial memecah RIA ke dalam penanganan kepentingan khusus dan membuat itu berguna sebagai alat kebijakan umum.

Risk Assessment and Uncertainty Analysis¹⁵

Tiga aspek penilaian risiko dan analisis ketidakpastian termasuk program RIA dari suatu negara menjadi bagian dalam kajian ini. Secara umum dan paling tepat penggunaan dari istilah itu berarti penilaian dari efek yang dimungkinkan karena penyebab tertentu. Di sini, tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi penyebab dari kemungkinan. Penilaian risiko kemudian digunakan untuk menilai dampak dari intervensi tertentu. Penilaian risiko tidak mengukur ketidakpastian tetapi probabilitas. Kedua, proyek analisis ketidakpastian pada kisaran yang dimungkinkan dari berbagai kemungkinan atas hasil karena kesalahan estimasi.

Sebagai contoh, kita dapat menentukan skenario terburuk dengan menggantikan perkiraan paling pesimis untuk setiap satu variabel pada satu waktu, memegang semua variabel lain tidak berubah untuk melihat mana yang paling penting. Analisa ketidakpastian digunakan untuk melengkapi para pembuat kebijakan dengan pemahaman yang lebih akurat tentang dampak-dampak yang dimungkinkan. Ketiga, variasi analisis kepastian adalah penggunaan pencegahan, prinsip yang berhubungan dengan pencegahan pada dasarnya mensyaratkan bahwa, bagi beberapa jenis dampak dan bahkan di mana ketidakpastian sangat tinggi, skenario terburuk harus digunakan untuk membenarkan intervensi.

Penilaian risiko dengan baik diuraikan di RIA di Australia, Inggris dan Amerika Serikat. RIA pada negara-negara lain, penilaian risiko hanya mengambil peran kecil dan hanya sebentar disebutkan. Analisis ketidakpastian yang lebih luas dimasukkan ke dalam panduan RIA di negara-negara tersebut. Hampir semua program RIA mengantisipasi bahwa asumsi utama akan diuji melalui analisis sensitivitas dari beberapa jenis.

¹⁵ Opcit, Jacob, H Scoot, 2007, hal 33-34

Pencegahan, tidak terintegrasi ke dalam RIA di negara-negara tersebut. Alasan untuk ini adalah tindakan pencegahan bukanlah konsep yang analitis tetapi merupakan kebijakan yang bereaksi dengan cara tertentu di bawah ketidakpastian. RIA dapat menghasilkan informasi untuk menginformasikan keputusan bagi penggunaan tindakan pencegahan tetapi RIA tidak bisa dengan sendirinya menunjukkan apakah tindakan pencegahan sesuai.

Praktek RIA Skala Nasional & Internasional

Reformasi regulasi perlu dilakukan di Indonesia karena regulasi membawa dampak negatif bagi kegiatan usaha dan perekonomian secara keseluruhan. Reformasi regulasi di Indonesia perlu dilakukan dengan tujuan antara lain: untuk meningkatkan daya saing (*competitiveness*), dapat menjadi dasar bagi program-program lain, seperti privatisasi dan kebijakan kompetisi, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dan meningkatkan konsultasi publik.

Reformasi regulasi melalui proses RIA dapat mendorong *teamwork* diantara pihak-pihak terkait dalam perumusan dan pengambilan kebijakan. Selain melibatkan partisipasi publik, RIA juga lebih memfokuskan pada kualitas regulasi dan dampaknya. Selain itu, melalui proses RIA juga dapat mendorong solusi alternatif yang mungkin akan lebih baik dibanding dengan penerapan regulasi.

Praktek RIA Skala Nasional dan Daerah ¹⁶

Bagaimana prakarsa RIA di Indonesia? Prakarsa pertama dilakukan oleh ADB pada tahun 2000 melalui program TA - *Promoting Deregulation and Competition*. *Output* dari kegiatan tersebut cukup banyak dan menjadi cikal bakal dari berkembangnya RIA secara luas oleh berbagai lembaga di berbagai daerah di Indonesia. Sejak prakarsa RIA digulirkan di Indonesia pada tahun 2000 tersebut, kegiatan RIA terus berlanjut dan berkembang hingga saat ini. Adapun praktek pada tingkat nasional dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Prakarsa RIA di Indonesia

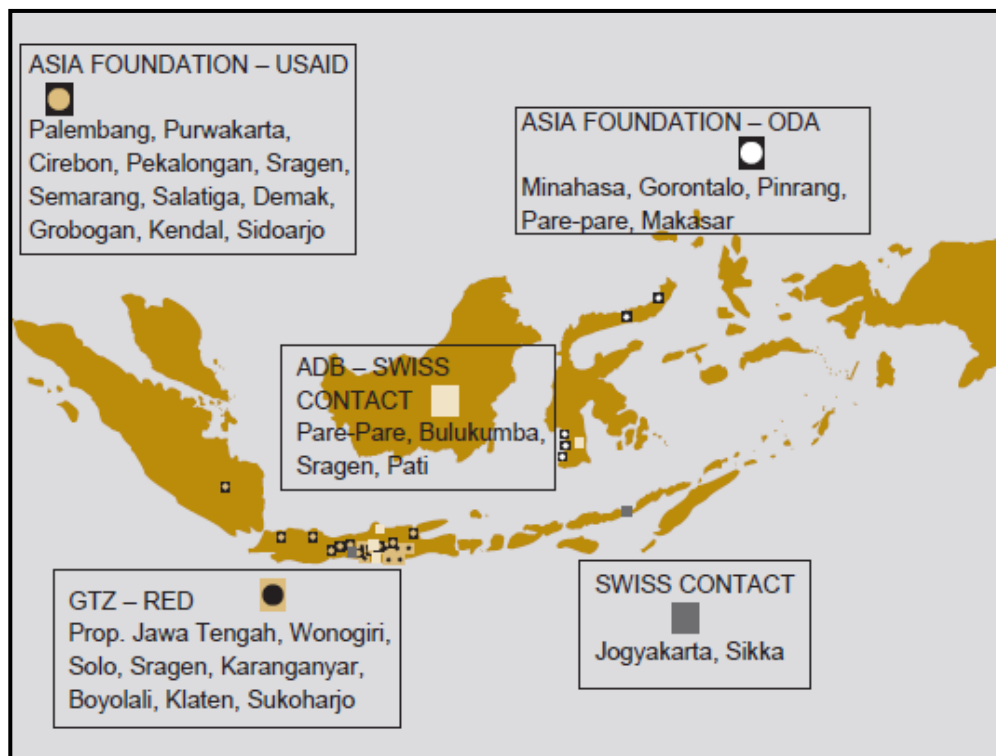
Institusi	Tahun	Kegiatan Utama (<i>Output</i>)
ADB	2000	<ul style="list-style-type: none"> Pembuatan Manual, Pembentukan Deregulation Task Force & Competition, Seminar Diseminasi dan Pelatihan, Mereviu 3 regulasi nasional
	2003-2004	<ul style="list-style-type: none"> Revisi Manual RIA dan menyusun Kerangka kelembagaan
PEG (USAID)	2001	<ul style="list-style-type: none"> Seminar diseminasi Sosialisasi di tingkat provinsi
Deperindag – BPPIP	2002	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi dan pelatihan
	2004	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan fasilitator dan sosialisasi ke provinsi

¹⁶ Opcit, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, 2007, hal 88-89

Institusi	Tahun	Kegiatan Utama (<i>Output</i>)
Deperdag	2005/2006	• Pelatihan RIA dan reviu 2 regulasi nasional
Bappenas	2003 2005 2006	• Pelatihan RIA • FGD tentang pelembagaan RIA • Pelatihan RIA untuk pejabat eselon 1 dan 2
Bapekki – Depkeu	2005	• Pelatihan RIA

Sumber : Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, 2007

Selain itu, beberapa lembaga seperti *The Asia Foundation-USAID-CIDA*, *Swisscontact-ADB*, dan *GTZ-RED* juga sudah dan sedang melaksanakan program RIA di berbagai daerah Indonesia. Sampai saat ini kegiatan program RIA tersebut sudah meliputi Sumatera, Jawa, Sulawesi dan Nusa Tenggara.¹⁷ Adapun visualisasi kegiatan RIA yang didampingi beberapa lembaga tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : The Asia Foundation, 2007

Gambar 1. Daerah yang Telah dan Sedang Melaksanakan Program RIA

Kota Parepare merupakan salah satu pionir penerapan RIA di daerah. Walikota telah mengeluarkan sebuah keputusan yang mengharuskan peraturan daerah yang membebani masyarakat harus dianalisis dengan proses RIA. Rancangan peraturan daerah tersebut harus dilampiri dengan hasil analisis RIA yang dilakukan oleh tim RIA yang mencakup komponen aparat pemerintah daerah maupun komponen masyarakat. Untuk

¹⁷ Lihat Manual Reviu Regulasi Indonesia (IRRM, *Indonesian Regulatory Review Manual*) (2004) dan Manual RIA, The Asia Foundation, 2007

menjamin kelangsungan program RIA, program ini telah dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka panjang. Beberapa daerah lain yang telah sukses menerapkan RIA antara lain adalah Kabupaten Sragen, Kabupaten Gorontalo, Kota Tomohon, dan Kabupaten Pekalongan.

Praktek RIA Skala Internasional¹⁸

Saat ini sudah banyak negara yang menerapkan kebijakan RIA. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kinerja pemerintah dalam menggunakan kewewenangannya dalam melakukan regulasi. Negara yang paling dulu menerapkan kebijakan RIA adalah Amerika Serikat, yaitu sejak tahun 1981. Setelah itu, dua negara berikutnya yang menerapkan kebijakan RIA adalah Inggris dan Canada. Beberapa poin penting yang menjadi "benang merah" dari praktik implementasi kebijakan RIA di beberapa negara adalah:

- **Ada dukungan atau komitmen politik.** Bentuk komitmen politik yang mengharuskan untuk menerapkan RIA bisa datang dari Presiden, Perdana Menteri, atau Kabinet.
- **Analisis dilakukan oleh regulator.** Regulator merupakan pihak yang paling tepat untuk melakukan RIA. Pada prinsipnya, pihak yang akan membuat regulasi harus bisa membuktikan bahwa regulasi yang dikeluarkan mempunyai manfaat yang lebih besar daripada beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat secara keseluruhan.
- **Publikasi hasil RIA.** Walaupun tidak semua negara mempublikasikan hasil RIA, namun sebagian besar negara mempublikasikannya. Regulasi yang dirumuskan melalui proses yang transparan, dan melibatkan partisipasi masyarakat, akan efektif dan memperoleh dukungan dari masyarakat dan para *stakeholders*.
- **Ada *quality control*.** Keberadaan lembaga pengawas merupakan hal penting dalam implementasi RIA. Negara-negara yang telah menerapkan RIA selalu mempunyai lembaga yang mengontrol kualitas dari setiap regulasi yang akan diterapkan

Beberapa kasus menarik terkait dengan penerapan kebijakan RIA di beberapa Negara adalah sebagai berikut:

- **Canada;** ada ketentuan bahwa revidi regulasi dilakukan setiap 10 tahun dan 7 tahun (*sunset clause*). Selain itu, ada standarisasi dan penyederhanaan arsip (masa retensi) yang dapat menghemat \$100 juta per tahun.
- **Inggris;** melakukan revisi suhu penyimpanan makanan tertentu (dari 5° menjadi 8°) yang menyebabkan penghematan sebesar GBP 41 juta per tahun. Selain itu

¹⁸ Opcit, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, 2007, hal 90-91

juga melakukan penyederhanaan formulir K3 yang menyebabkan penghematan sebesar GBP 1 juta per tahun.

- **Ukraina;** melakukan reviu terhadap rancangan regulasi yang baru diusulkan dan regulasi yang sedang diberlakukan. Pada periode 1998-2000 telah melakukan reviu sebanyak 120 draft regulasi. Dari jumlah tersebut, sebesar 60% draft ditolak. Sementara reviu regulasi yang sudah berlaku dilakukan secara bertahap.
- **Korea Selatan;** 50% dari 11000 regulasi dihapus dalam satu tahun. Selain itu, pada tahun 1999 sebanyak 241 draft regulasi dari 884 draft regulasi ditolak.
- **Kenya;** menerbitkan kebijakan perizinan tunggal (Single Business Permit Policy) yang diadopsi oleh 32 propinsi, dan mengurangi perizinan usaha dari 25 menjadi hanya 1 jenis izin sehingga dapat mengurangi biaya transaksi sampai dengan 70%.

Adapun pelaksanaan kebijakan RIA di beberapa negara OECD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Kebijakan RIA di Beberapa Negara OECD

Negara	Tahun	RIA diwajibkan oleh	Analisis RIA dilakukan oleh	Apakah dipublikasikan?	Quality Control
USA	1981	Instruksi presiden, beberapa undang-undang	Regulator	Semua RIA (draft dan final) dipublikasi	Reviu oleh Office of Management and Budget (OMB). Tersedia <i>guidance</i>
Inggris	1985	Kebijakan Kabinet	Regulator	Ya, dipublikasikan sebagai bagian dari reviu akhir oleh komite parlemen	Menteri terkait; reviu oleh Deperindang; Tersedia <i>guidance</i>
Australia	1985	Kebijakan Kabinet	Regulator	Ya, diedarkan untuk direviu	Reviu independen oleh Komisi Industri; Tersedia <i>guidance</i>
Canada	1986	Keputusan Treasury Board, sesuai wewenang UU Administrasi Keuangan	Regulator	Ya, semua RIA (draft & final) diterbitkan dalam lembaran negara	Saran dari Sekretariat Treasury Board; Tersedia <i>guidance</i>
Denmark	1993	Kabinet	Regulator	Ya	Reviu oleh Menteri Keuangan
Belanda	1994	Instruksi Perdana Menteri	Regulator	Ya, melalui publikasi dan penyerahan pada parlemen	Saran dari menteri lainnya, terutama menteri kehakiman dan menteri urusan ekonomi; reviu oleh dewan independent
Mexico	1995	Instruksi Presiden	Regulator	Tidak	Otorisasi oleh Presiden; Reviu oleh Menteri Komersial; Reviu oleh Economic Deregulation Council
Jepang	1998	Keputusan Kabinet	Regulator	Tidak	Tanggungjawab pada regulator; pedoman dikeluarkan oleh Menteri administrasi publik, dalam negeri, pos dan telekomunikasi

Sumber : *Indonesian Regulatory Review Manual, 2004*¹⁹

Sampai tahun 2000, lebih dari 60 persen negara OECD sudah menerapkan program RIA yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja pemerintah dalam

¹⁹ Opcit, *Indonesian Regulatory Review Manual, 2004*

menggunakan kekuasaan atau kewenangan mereka dalam melakukan regulasi. Sebagian besar kebijakan regulasi di negara OECD yang didasarkan pada prinsip kualitas regulasi dengan menggunakan RIA, baru diadopsi kurang dari 10 tahun kecuali pada beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Canada. Berikut ini akan dipaparkan praktik terbaik pelaksanaan RIA di tiga Negara tersebut.

Praktek RIA di Amerika Serikat

Amerika Serikat adalah pelopor dalam reformasi regulasi di dunia selama lebih dari seperempat abad. Namun demikian, tidak seperti persepsi umum, AS tidaklah mempunyai regulasi yang lebih sedikit dibanding negara OECD lainnya. Namun demikian regulasinya berbeda karena adanya prinsip kebijakan pro-kompetisi pada tingkat federal, dan prinsip keterbukaan serta boleh dikritik dalam pembuatan suatu regulasi. RIA dimulai di AS pada tahun 1974 dengan dimasukkannya analisis manfaat dan biaya dalam *Inflation Impact Assessments*. RIA secara penuh telah menjadi keharusan atas perintah eksekutif untuk semua peraturan sosial penting sejak 1981, dengan *Office of Management and Budget* (OMB) yang bertanggung jawab untuk pengendalian mutu.

Nilai RIA meningkat secara drastis dengan diintegrasikannya ke dalam proses konsultasi publik. Sekarang analisis manfaat dan biaya secara kuantitatif dilakukan dalam mempersiapkan regulasi sosial yang penting, namun agak kurang diterapkan dalam regulasi ekonomi utama. Beberapa poin penting yang dapat diambil dari AS sebagai praktik RIA terbaik (*best practices*), adalah:

- a. Komitmen politik terhadap RIA; di AS komitmen politik terhadap RIA datang dari pimpinan politik tertinggi. Sejak 1981, keharusan melakukan RIA telah disahkan dengan perintah eksekutif. Lebih jauh lagi, setiap Presiden sejak 1981 telah mengeluarkan revisi masing-masing terhadap RIA untuk memastikan bahwa komitmen terhadap RIA masih tetap didukung oleh Presiden yang sedang menjabat.
- b. Tanggung jawab regulator dan badan pengawas yang jelas; AS telah menetapkan tanggung jawab yang jelas untuk regulator dalam melakukan RIA sejak awal dan peranan yang kuat bagi penguasa revidi pusat (OMB) dan kontrol kualitas. Selain itu, OMB berada di dalam kantor eksekutif presiden (*Executive Office of the President*) dan secara fungsional dekat pada pemegang kekuasaan dalam menyusun anggaran. Karena ada kejelasan misi, staf yang spesialis dan ahli, dan juga lokasinya di dalam kantor eksekutif presiden, OMB dapat memberikan pengaruh yang kuat pada pengendalian mutu RIA.
- c. Integrasi RIA pada proses kebijakan; prosedur RIA di AS menuntut bahwa RIA harus dibuka kepada publik baik bagi usulan regulasi maupun yang sudah diputuskan. Hal ini untuk meyakinkan bahwa lembaga yang terkait bertanggung jawab terhadap mutu dan relevansi RIA dalam proses pengambilan keputusan. OMB terlibat dengan lembaga yang ingin membuat

regulasi pada tahap seawal mungkin dalam rangka memperbaiki mutu RIA dan mengurangi konflik pada tahap reuiv formal.

- d. Konsultasi publik dan transparansi; hanya sedikit dari negara OECD yang menguji asumsi dan data yg digunakan dalam RIA dengan konsultasi public dan publikasi, dan AS termasuk yang melakukan hal tersebut. RIA di AS sepenuhnya terintegrasi dengan proses konsultasi publik, dan memberikan *benchmark* yang baik untuk negara-negara lain. RIA dituntut untuk dibuka kepada publik baik pada tahap proposal maupun pada tahap keputusan final sebagai bagian dari proses “notice and comment” yang memungkinkan semua anggota masyarakat yang berkepentingan memberikan komentar terhadap asumsi dan hasil dari analisis yang dilakukan.
- e. Menuju regulasi yang berorientasi hasil yang bertanggung jawab; *Government Performance and Results Act* pada 1993 menuntut departemen pemerintah mempersiapkan rencana strategis yang mengidentifikasi pernyataan misi, tujuan strategis, dan ukuran-ukuran keragaan. Diantara ukuran keragaan yang ditetapkan regulator pada tahun 1999 adalah komitmen Departemen Tenaga Kerja untuk mengurangi tingkat kecelakaan yang fatal pada industri bangunan sebesar 3%, dan pada FDA untuk memastikan bahwa 40% produksi yang dihasilkan oleh AS ditanam dan diproses dengan menggunakan *good practices* untuk meminimumkan kontaminasi yang berbahaya.

Praktek RIA di Inggris

Selama 20 tahun terakhir ini negara Inggris secara progressive telah membentuk lembaga umum maupun khusus untuk meningkatkan kebijakan reformasi regulasi. Pemerintah Inggris telah menaruh perhatian yang sangat besar terhadap pengembangan RIA, yang dimulai pada tahun 1985, dengan mensyaratkan penilaian atas *compliance cost* yang ditanggung oleh pelaku bisnis (*business compliance costs assessment*). Target penting dalam reformasi regulasi pada waktu itu adalah mengurangi intervensi pemerintah dalam ekonomi, program privatisasi besar-besaran dan deregulasi ekonomi. Kemudian, dilanjutkan dengan progam re-regulasi. Program ini melibatkan arsitektur regulasi yang baru: pembentukan *sectoral regulator*, yang tidak dipengaruhi pemerintah, untuk mengelola *regulatory regime* yang baru dengan tujuan untuk meningkatkan kompetisi pada sektor-sektor yang baru diprivatisasi, misalnya, telekomunikasi, air minum, listrik dan gas.

Program untuk mengurangi beban regulasi bagi perusahaan juga menjadi agenda yang penting. Pembentukan *Small Business Services* (SBS) pada tahun 2000 menunjukkan bahwa pemerintah secara terus-menerus menaruh prioritas pada pengembangan UKM. Dalam kebijakan yang berlaku, undang-undang maupun regulasi baru yang memiliki dampak yang cukup besar terhadap dunia usaha, yayasan sosial atau *voluntary sector* harus dikenai proses *Regulatory Impact Assessment* (RIA). Proses RIA harus dibuat pada

saat pokok-pokok regulasi baru disampaikan pada menteri, kemudian disusun RIA yang lebih mendalam untuk keperluan konsultasi publik. Tanggapan UKM dipandang penting, karena setiap pembuat regulasi harus berkonsultasi dengan SBS, dan SBS memiliki posisi institusional yang kuat dalam proses pembuatan regulasi. Beberapa poin penting yang dapat diambil dari Inggris sebagai praktik RIA terbaik (*best practices*), adalah:

- a. Pembentukan kelembagaan yang kuat untuk meningkatkan kualitas regulasi; Seperti negara OECD lainnya, meskipun di Inggris setiap menteri bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan reformasi regulasi, namun biasanya sangat sulit bagi kementerian tersebut untuk mereformasi dirinya sendiri. Oleh karena itu, Inggris telah membentuk berbagai lembaga *oversight* untuk meningkatkan dan mereviu proses reformasi regulasi.

Lembaga-lembaga *oversight* yang penting antara lain adalah:

- *The Small Business Services* (SBS); SBS didirikan tahun 2000 sebagai satu-satunya organisasi yang sepenuhnya ditugaskan untuk membantu UKM dan mewakili mereka di pemerintahan. Lembaga ini harus dikonsultasi dalam semua RIA yang mempengaruhi UKM.
- *The Better Regulation Task Force* (BRTF); BRTF adalah lembaga *advisory independen* yang didirikan tahun 1977, dengan 16 orang anggota sukarelawan (tidak dibayar). Tujuannya adalah memberikan nasihat kepada pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan kredibilitas regulasi pemerintah dengan memastikan adanya kebutuhan, keadilan, kemampuan, dan kesederhanaan dalam pemahaman dan pengelolaan regulasi, dengan mengutamakan pada kebutuhan pengusaha kecil dan masyarakat. Anggota BRTF ditunjuk oleh Perdana Menteri dari berbagai kalangan (misalnya, usaha kecil dan besar, serikat pekerja, kelompok konsumen, dan *voluntary sector*).
- *The Panel for Regulatory Accountability* (PRA); PRA didirikan tahun 1999 untuk melakukan evaluasi yang menyeluruh atas regulasi yang diusulkan dan untuk memastikan adanya peningkatan dalam system regulatory dan kinerja setiap departemen. Panel ini terdiri atas beberapa anggota kunci, seperti SBS dan BRTF.
- *The Regulatory Impact Unit* (RIU); RIU memonitor, melaporkan, dan mendorong progres dalam reformasi regulasi pada semua lembaga pemerintahan. Lembaga ini memberikan pedoman dan mereviu proses dan laporan RIA. RIU memiliki 60 staf dan merupakan sekretariat kabinet. RIU memberikan fasilitas kesekretarian bagi PRA dan BRTF. Lembaga ini merupakan pusat jaringan dari unit-unit regulatory impact di departemen (DRIUs, *Department Regulatory Impact Units*). DRIU adalah unit kecil (dengan staf 1 sampai 4 orang) yang dibuat dalam setiap departemen untuk mengkoordinasikan pekerjaan reformasi regulasi. Mereka

memberikan arahan dan akan menghilangkan regulasi yang buruk dan yang pelaksanaan serta pelaporan RIA tidak baik.

- b. Komitmen politik yang kuat; di Inggris, semua regulasi yang diajukan pada Parlemen dan Kabinet harus dilampiri dengan laporan RIA. Menteri harus menanda-tangani RIA yang menjadi tanggung jawabnya dan melaporkan secara periodik kepada *Panel for Regulatory Accountability* (PRA).
- c. Pelatihan bagi regulator; di Inggris, tersedia banyak pedoman untuk menyusun RIA yang berkualitas. Seminar, training, dan lokakarya RIA diberikan oleh RIU, dan metodologi RIA telah disebar luaskan kepada hampir semua regulator.
- d. Penerapan RIA bagi regulasi yang sedang berlaku; Undang-undang Reformasi Regulasi tahun 2001 merupakan komitmen penting bagi peningkatan kapasitas untuk menerapkan RIA tidak hanya bagi regulasi yang baru, melainkan juga bagi regulasi yang sedang berjalan. UU tersebut memungkinkan menteri untuk merubah atau mengajukan keberatan terhadap UU melalui keputusan menteri, untuk mengurangi beban regulasi, membetulkan inkonsistensi dan anomali.
- e. Komitmen kuat untuk mengurangi beban administratif bagi UKM; Pemerintah Inggris sangat memperhatikan bahwa biaya untuk mentaati regulasi baru atau revisi, sering lebih terasa berat oleh usaha kecil yang tidak memiliki kemampuan untuk menanggungnya. Metodologi yang ada memberikan apa yang disebut "*Small Business Litmus Test*", yang mencakup dialog atas dampak proposal regulasi dengan beberapa usaha kecil. Selain itu, departemen dianjurkan untuk melibatkan sebanyak mungkin usaha kecil dalam proses konsultasinya

Praktek RIA di Canada

Canada adalah salah satu negara OECD yang pertama menerapkan program reformasi regulasi dan merupakan leader yang konsisten dan *innovator* dalam berbagai topik. Prinsip dan proses pengelolaan kualitas regulasi telah diintegrasikan dalam proses pembuatan kebijakan dan ditanamkan dalam budaya administratif para pembuat kebijakan. Analisis dampak sosio ekonomi secara profesional bagi regulasi yang besar pertama kali diharuskan pada tahun 1978. Kemudian pada tahun 1986, pemerintah mewajibkan RIA bagi semua proposal regulasi.

Strategi reformasi regulasi 1986 mencakup, antara lain, peran penting pasar yang efisien, keharusan untuk membatasi pertumbuhan regulasi baru, *benefit* harus melebihi *costs*, masyarakat harus memiliki akses yang lebih besar terhadap proses pembuatan regulasi, dan fokus perhatian harus pada beban regulasi secara menyeluruh. Beberapa poin penting yang dapat diambil dari Canada sebagai praktik RIA terbaik (*best practices*), adalah:

- a. Komitmen politik yang kuat; RIA tercermin dalam semua kebijakan regulasi, RIA pada akhirnya adalah dokumen Kabinet dan menteri harus menandatangani.
- b. Pembentukan kelembagaan yang kuat untuk meningkatkan kualitas regulasi; Canada membentuk berbagai lembaga *oversight*, sebagai berikut:
 - *The Special Committee of Council (SCC)*; SCC adalah komite Kabinet yang bertanggung jawab untuk mengawasi, mereviu, dan koordinasi regulasi pada pemerintah secara keseluruhan.
 - *The regulatory Affairs and Orders in Council Secretariate (RAOICS)*; RAOICS terletak pada *Privy Council Office (PCO, Kabinet)*, dan memiliki tanggung jawab fungsional untuk kebijakan regulatory, termasuk mengawasi dan menilai RIA dan mendukung pengambilan keputusan Kabinet dalam masalah regulasi.
 - *The Deputy Ministers' Challenge Team on Law-Making and Governance (DMCT)*; DMCT merupakan *tink-tank* konsultan bagi pemerintah dalam kebijakan regulasi. Lembaga ini didirikan tahun 1996 dan telah berkembang sebagai forum penting bagi pejabat senior untuk membahas kebijakan regulatory dan rencana pengembangannya.
 - *Treasury Board Secretariate (TBS)*; TBS bertanggung jawab untuk memberikan pedoman pada semua departemen mengenai laporan kinerjanya, termasuk memastikan bahwa regulator menunjukkan efektivitas dalam pelaksanaan programnya.
 - *Standing Joint Committee for the Scrutiny of Regulation (SJC)*; SJC melakukan pengawasan parlemen terhadap regulasi *subordinate*, terutama mengenai legalitas dan *drafting*-nya.
- c. Pelatihan bagi regulator; training dan pedoman yang diterbitkan oleh pemerintah Canada merupakan benchmark bagi banyak negara OECD lainnya. Di Canada tersedia banyak pelatihan, manual, dan alat pembelajaran. Pedoman RIA Canada merupakan salah satu pedoman yang paling sederhana dan mudah dimengerti. Pada Agustus 2001, RAOICS meluncurkan sarana belajar dan informasi interaktif melalui *web*.
- d. Menggunakan metode analisis yang konsisten tetapi fleksibel; *costs benefit analysis* telah dilakukan sejak tahun 1986. Selain itu, pedoman RIA menekankan pentingnya fleksibilitas maupun proporsionalitas (tingkat analisis harus proporsional dengan arti penting proposal yang sedang dibahas).
- e. Mengembangkan dan menerapkan strategi pengumpulan data; PCO memberikan dokumen pedoman terhadap pengukuran. *Auditor-General (BPK)* telah mengidentifikasi bidang-bidang kunci dimana regulator harus memperoleh informasi yang lebih baik mengenai resiko yang terkait dengan kegiatan tersebut.

- f. Mengintegrasikan RIA dengan proses pembuatan kebijakan; RIA hanya bisa efektif kalau diintegrasikan dengan pembuatan kebijakan, dan tidak hanya sebagai "justifikasi" setelah kebijakan diputuskan. Reviu terhadap RIA di Canada baru-baru ini menyimpulkan bahwa RIA telah merubah proses pengambilan keputusan.
- g. Melibatkan publik secara ekstensif; konsultasi publik sangat penting bagi kebijakan regulatory. Dalam hal ini, sistem di Canada sangat istimewa. Fakta bahwa RIA dipublikasi dua kali (pada tahap draft dan final) menunjukkan besarnya keterlibatan publik dalam proses pembuatan regulasi.

Langkah Upaya Penerapan RIA Kedepan

Prakarsa RIA yang sudah bergulir di Indonesia sejak tahun 2000, memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Semangat dan Itikad yang baik dari pihak pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui reformasi regulasi perlu terus dijaga. Namun demikian, untuk mewujudkan hal tersebut bukan berarti tanpa tantangan. Masih diperlukan serangkaian langkah-langkah ke depan yang perlu ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut. Langkah-langkah ke depan yang perlu dilakukan adalah:

- **Ada dukungan politik;** praktik terbaik di beberapa Negara yang lebih dulu menerapkan RIA, seperti Amerika Serikat, Inggris dan Canada, menunjukkan bahwa dukungan atau komitmen politik memainkan peranan penting dalam implementasi RIA. Tanpa dukungan politik yang kuat, proses RIA tidak akan berjalan mulus dan hasil RIA kemungkinan tidak akan diimplementasikan. Pada akhirnya, semua akan tergantung pada regulator sebagai pengambil kebijakan.
- **Ada standar mutu yang jelas;** hasil RIA harus dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak terutama kepada stakeholder yang terkena regulasi. Oleh karena itu, standar mutu yang jelas mutlak diperlukan agar tim RIA di berbagai daerah dan tingkatan pemerintahan dapat mempunyai pedoman yang sama dengan standar mutu yang baik.
- **Mengembangkan metodologi yang fleksibel dan layak;** sebuah metodologi mutlak diperlukan dalam kegiatan RIA. Namun metodologi yang kaku dan sulit diimplementasikan oleh regulator hanya akan menyebabkan seolah-olah RIA menjadi beban pekerjaan dan tidak menarik minat regulator untuk melakukannya. Oleh karena itu, mengembangkan metodologi yang fleksibel dan layak sangat diperlukan agar regulator memandang bahwa RIA merupakan langkah yang mudah dan logis, serta dianggap sebagai sesuatu yang baik dan sudah seharusnya dilakukan.
- **Mengembangkan sebuah struktur kelembagaan;** pengembangan struktur kelembagaan akan berpengaruh besar terhadap perkembangan RIA di Indonesia. Praktik terbaik di Inggris dan Canada menunjukkan bahwa

pengembangan kelembagaan dengan membentuk berbagai lembaga *oversight* berpengaruh terhadap kualitas RIA yang dihasilkan.

- **Melakukan konsultasi publik;** konsultasi publik merupakan bagian penting pada setiap tahapan RIA. Oleh karena itu, melakukan diskusi dengan berbagai pihak, terutama stakeholders yang terkait regulasi, merupakan keharusan dalam setiap proses RIA yang dilakukan.
- **Melakukan komunikasi informasi;** Komunikasi informasi juga memegang peranan besar dalam proses RIA. Setiap laporan RIA harus dikomunikasikan kepada seluruh *stakeholders* sehingga terjadi transparansi dan akuntabilitas dari setiap laporan RIA yang dihasilkan.
- **Membangun keahlian dan keterampilan di kalangan regulator;** seiring dengan perkembangan waktu, persoalan yang dihadapi regulator terkait dengan kebijakan publik yang akan dikaji juga semakin berkembang. Oleh karena itu keahlian dan keterampilan regulator juga perlu selalu dikembangkan. Dengan demikian, regulator yang melakukan RIA dapat mengikuti perkembangan persoalan yang harus dipecahkan yang semakin hari cenderung semakin kompleks.

Dari paparan di atas nampak bahwa langkah-langkah ke depan yang harus dilakukan masih cukup panjang. Namun sampai sejauh ini, sudah berada dalam posisi dan arah yang benar, sehingga tidak ada alasan untuk menundanya, melainkan terus melangkah sehingga reformasi regulasi dapat terwujud yang ditunjukkan oleh iklim usaha dan investasi yang semakin kondusif.

Penutup

Selama ini dalam penyusunan produk hukum lebih bersifat legal drafting yaitu ditekankan kepada kesesuaian dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Metode RIA lebih dari sekadar itu. Dengan RIA para perancang kebijakan daerah sejak awal sudah dapat mengalkulasi seberapa besar biaya yang ditanggung serta manfaat yang diperoleh dari sebuah regulasi yang dirancang. Dengan demikian, para pengambil kebijakan dapat menilai mana perda yang produktif dan kontraproduktif terhadap dunia usaha dan kepentingan publik. Singkatnya, RIA diharapkan membantu membangun kebijakan populis berorientasi kepentingan semua pemangku kebijakan, efektif, kredibel dan responsif.

Review dari praktek saat ini dalam RIA di negara-negara paling maju mengkonfirmasi bahwa metode RIA mendukung kebijakan lingkungan, sosial dan ekonomi yang berkembang terhadap berbagai bentuk *soft* analisis biaya manfaat. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia dan juga Komisi Eropa secara aktif mencari cara untuk meningkatkan kekakuan dan kualitas RIA sebagai suatu kerangka terpadu untuk menangani kompleksitas kebijakan publik modern. Mereka menetapkan patokan kontemporer untuk RIA yang baik. Fakta bahwa negara-negara yang kukuh

dengan standar perlindungan lingkungan dan catatan yang mendorong ke arah kerangka kerja RIA yang lebih terintegrasi, berdasarkan *soft* BCA dan penekanan kuat pada ukuran kuantitatif dampak, menunjukkan bahwa kerangka tersebut adalah sepenuhnya konsisten dengan nilai-nilai perlindungan sosial dan lingkungan.

REFERENSI

- BTRF (Better Regulation Task Force) (2005), 'Better Regulation – From Design to delivery, Annual Report 2005' (<http://brc.gov.uk/publication/designdelivery.asp>), Government of the UK
- CEC (Commission of the European Communities) (2005a), 'Impact Assessment Guidelines', SEC (2005) 791, Brussels
- CEC (2005b), 'Better regulation for growth and Jobs in the European Union' Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, Brussels, 16 March 2005, COM (2005) 97 Final.
- CEC (2005c), 'An EU Common Methodology for Assessing Administrative Cost Imposed by Legislation', Communication from the Commission, COM (2005) 518 Final, Brussels
- Government of Canada (1999), 'Regulatory Policy', Privy Council Office
- IMD World Competitiveness Yearbook 2010, "The World Competitiveness Scoreboard 2010, Electro-nic Copy Available At: <http://www.imd.org/research/publications/wcy/upload/scoreboard.pdf>
- Jacobs, S. (2006), *Current trends in the process and methods of regulatory impact analysis : The Challenges of Mainstreaming RIA into Policy-Making*, Washington, DC; Jacobs and Associated Inc. at www.regulatoryreform.com
- Jacob, H Scoot, 2007, "Current trends in the process and methods of regulatory impact assessment : mainstreaming RIA into policy processes", in book "Regulatory impact assessment: towards better regulation?" chapter II (page 17), Edward Elgar Publishing, United Kingdom
- Laura Jones and Stephen Graf, 2001, *Canada's Regulatory Burden: How Many Regulations? At What Costs?*, The Fraser Institute
- Manual Reviu Regulasi Indonesia, 2004, (IRRM, *Indonesian Regulatory Review Manual*)
- Manual RIA, 2007, The Asia Foundation
- NAO (National Audit Office) (2005), 'Evaluation of Regulatory Impact Assessment Compendium Report 2004-05', Report by Comptroller and Auditor General, HC 841 Session 2004-05, 17 March 2005
- OECD (2002a), *Regulatory Policies in OECD Countries: From Interventionism to Regulatory Governance*, Paris : OECD
- OECD (2002b), *Government Capacity to Ensure High Quality Regulation*, in *Canada: Maintaining Leadership Through Innovation*, Paris : OECD

OMB (Office Management and Budget) (2003), 'Circular A-4, Subject: Regulatory Analysis', Washington DC: Government of the US.

ORR (Office Regulation Review) (1998), *A Guide to Regulation*, Government of Australia, 2nd edn, December.

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, 2007, "Tatakelola Pemerintahan Daerah", Tangerang. Electronic copy available at: www.stan-star.ac.id